



## **BUPATI GOWA**

### **KATA PENGANTAR**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiqnya semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gowa, termasuk dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa ini merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun 2020 ini merupakan suatu kewajiban konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas - tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program pencerahan qolbu jum'at ibadah tetap terlaksana, program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim putra putri terbaik kita untuk disekolahkan dengan dibiayai oleh pemerintah.



Akhirnya kami menyadari sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat lebih maju dan lebih berhasil.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Sungguminasa,       Maret 2021

**BUPATI GOWA,**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH**



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>	
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
DAFTAR TABEL .....	iv	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>	
1.1    DASAR HUKUM.....	1	
1.2    VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA.....	7	
1.2.1    VISI KABUPATEN GOWA.....	7	
1.2.2    MISI KABUPATEN GOWA.....	9	
1.3    DATA UMUM DAERAH.....	10	
1.3.1    KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	10	
1.3.2    GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN.....	11	
1.3.3    GAMBARAN UMUM JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)..	12	
<b>BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	<b>15</b>	
2.1    PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	15	
2.2    PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	19	
2.3    PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	21	
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>22</b>	
3.1    CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22	
3.1.1    URUSAN KONKRUEN.....	22	
3.1.2    RINGKASAN URUSAN PILIHAN.....	82	
3.1.3    FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH....	94	
3.1.4    RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.....	119	
3.2    KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	121	
3.3    TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA.....	126	
<b>BAB IV CAPAIAN KINERA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>130</b>	
4.1    TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA.....	130	
4.2    TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA.....	135	
4.3    HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	135	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>	

\*\*\*\*\*



## **BAB I P E N D A H U L U A N**

### **1.1 DASAR HUKUM**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntunan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan



terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”.

Atas dasar tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun 2020 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2020.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah antara lain :

**1. UNDANG - UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI**

Dasar hukum terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa yang merupakan turunan dari Undang - undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar.

**2. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ditetapkan undang - undang yang berisikan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas.

Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akuntabel di hadapan masyarakat.

**3. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA**

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam undang - undang ini, meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyusunan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyesuaian anggaran.

Belanja Daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program, kegiatan dan jenis belanja. Hal ini berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**4. UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA**

Undang - Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi negara dengan maksud untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga antara kewenangan dan dana yang diperlukan dapat digunakan dengan sebaik - baiknya untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan di daerah.

**5. UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA**

Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dilakukan oleh BPK yang meliputi seluruh unsur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti antara lain melalui pembahasan bersama dengan pihak terkait.

**6. UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu



diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

**7. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

Undang - Undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam rangka mengembangkan mekanisme **checks and balances** antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra yang sejajar demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maka laporan pertanggungjawaban tersebut sifatnya berubah menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 366 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”*.

Laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut sifatnya sebagai suatu **progress report**, yang tidak membawa implikasi pemberhentian Kepala Daerah.

**8. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

Otonomi daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

**10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

**11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

**12. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja





Daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Peraturan ini memuat sistematika dan tata cara penyusunan dan pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah secara rinci dan sistematis. Memuat dasar hukum penyusunan, visi misi kepala daerah serta data umum wilayah Kabupaten Gowa termasuk juga data capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi atas permasalahan tersebut.

**14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.

**15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021**

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan



sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2016 - 2021.

**16. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.

**17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2020**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan, dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2020.

**1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA**

**1.1.1 VISI KABUPATEN GOWA**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan **“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan III (ketiga) periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode ketiga ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2016-2021.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu **“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”**, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisialisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun **Visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

**Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:**

Visi di atas memiliki empat pokok visi, yaitu:

1. **Berkualitas** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religius dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius.



Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran.

2. **Mandiri** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan pendapatan per kapita.
3. **Berdaya saing** dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan ruang, meningkatnya kualitas kawasan permukiman, meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, meningkatnya pengelolaan kawasan, dan meningkatnya kualitas lingkungan. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan pertumbuhan nilai investasi.
4. **Tata kelola pemerintahan yang baik** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Opini BPK terhadap laporan keuangan.

### **1.1.2 MISI KABUPATEN GOWA**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.



2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan: pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius.

Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan penguatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan serta meningkatkan kerjasama dan keintegrasian antar desa dan kelurahan dalam pengembangan wilayah.

Misi “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis” yang diwujudkan dalam tatakelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

### **1.3 DATA UMUM DAERAH**

#### **1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH**

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana



wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup>, atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km<sup>2</sup> atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km<sup>2</sup> atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

### **1.3.2 GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN**

Letak wilayah administrasi tersebut menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2019 tercatat sebanyak 757.369 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat sebanyak 763.387 jiwa yang terdiri dari 378.413 jiwa penduduk laki-laki, dan 384.974 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 96,96 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan



penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 397 jiwa/km<sup>2</sup>. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Adapun data penduduk Kabupaten Gowa pada periode tahun 2019 - 2020 secara terinci dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1. Data Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2020**

RINCIAN	2019	2020
1. Jumlah Penduduk	757.369	763.387
a. Laki-laki (jiwa)	375.190	378.413
b. Perempuan (jiwa)	382.179	384.974
2. Kepadatan/Km <sup>2</sup> (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	399	397
3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/RT)	4	4

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Gowa, 2020.

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin dan seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar** membuat keduanya diangkat oleh negara sebagai Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 1.3.3 GAMBARAN UMUM JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pegawai merupakan sumber daya utama dalam suatu organisasi, mereka dituntut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada kinerja setiap pegawainya. Keberhasilannya berasal dari proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja pegawai, maka proses kerja dapat dilihat dari baik tidaknya setiap pegawai melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap pegawai dan hasil kerjanya masing-masing.

Dalam rangka Peningkatan mutu dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, efisien dan memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik sangat populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang semakin



meningkat. Masyarakat sebagai subjek pelayanan tidak ingin lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang berbelit-belit.

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah membentuk susunan perangkat daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Staf Ahli; Sekretariat Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Inspektorat Daerah; 25 (dua puluh lima) Dinas, dan 6 (enam) Badan serta ditambah dengan 18 (delapan belas) Pemerintahan Kecamatan.

Sesuai perangkat daerah yang telah dibentuk maka disesuaikan dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 7.309 Orang, dari jumlah tersebut terbagi atas beberapa Perangkat Daerah yang terdiri dari tenaga Teknis, Tenaga Fungsional Pendidik, Tenaga Fungsional Kesehatan dan Fungsional tertentu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020.**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>JUMLAH PNS</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	4004
2	DINAS KESEHATAN	918
3	RSUD SYECH YUSUF	471
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	128
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	33
6	SATPOL PP	50
7	DINAS SOSIAL	32
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	19
9	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	38
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	14
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	29
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35
13	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	33
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	35
16	DINAS PERHUBUNGAN	63
17	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK PERSANDIAN	38
18	DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENEGAH	22
19	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	31
20	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	31
21	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	16
22	DINAS PERIKANAN	32
23	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	38





## Pendahuluan

24	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	126
25	DINAS PETERNAKAN & PERKEBUNAN	70
26	DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN	39
27	SEKRETARIAT DAERAH	130
28	SEKRETARIAT DPRD	38
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19
30	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	18
31	INSPEKTORAT DAERAH	39
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	55
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	42
35	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	43
36	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	16
37	KECAMATAN SOMBA OPU	93
38	KECAMATAN PALLANGGA	47
39	KECAMATAN BAJENG	38
40	KECAMATAN BONTONOMPO	38
41	KECAMATAN BONTO MARANNU	36
42	KECAMATAN PARANGLOE	28
43	KECAMATAN TINGGIMONCONG	31
44	KECAMATAN BUNGAYA	24
45	KECAMATAN TOMPO BULU	20
46	KECAMATAN BIRING BULU	24
47	KECAMATAN TOMBOLO PAO	18
48	KECAMATAN BAROMBONG	25
49	KECAMATAN PATTALLASSANG	16
50	KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	23
51	KECAMATAN BONTOLEMPANGAN	14
52	KECAMATAN BAJENG BARAT	14
53	KECAMATAN PARIGI	11
54	KECAMATAN MANUJU	15
<b>JUMLAH</b>		<b>7309</b>

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Gowa Tahun 2020

Pegawai Negeri Sipil mayoritas pada Dinas Pendidikan dimana terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dari tenaga Struktural dan Fungsional yang terdiri dari Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, Guru, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah. Setelah itu terbanyak pada Dinas Kesehatan dimana terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dari tenaga Struktural dan Fungsional tertentu yang tersebar pada setiap Puskesmas Se Kabupaten Gowa. Kemudian dari Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang juga terdiri dari tenaga Struktural dan Fungsional tertentu dokter dan Perawat. Selain itu juga terdapat tenaga Struktural dan Fungsional Dari Organisasi Perangkat Daerah Badan dan Dinas serta 18 Kantor Kecamatan pada Kabupaten Gowa yang terdiri dari 46 Kelurahan.



**BAB II**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran



pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat.

Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari penerimaan daerah berupa pajak daerah.

Dalam strategi pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya antara lain intensifikasi pungutan dan retribusi oleh unit-unit kerja pengelola PAD tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan kinerja Holding Company dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **2. Target dan Realisasi Pendapatan**

Untuk Tahun Anggaran 2020 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.845.932.697.136,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.883.818.117.705,74 atau sebesar 102,05 persen yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp.228.174.016.623,00 telah terealisasi sebesar Rp.241.470.327.965,34 atau 105,83 persen, dengan rincian sebagai berikut :



## Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.105.679.635.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.115.543.741.226,00 atau 109,33 persen;
  - Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.73.414.583.729,00 dengan realisasi sebesar Rp.66.507.429.022,99 atau 90,59 persen;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.5.020.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.342.158.893,00 atau 86,50 persen;
  - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.44.059.797.464,00 dengan realisasi sebesar Rp.55.076.998.823,35 atau 125,01 persen.
- b. Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp.1.337.333.973.113,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.358.630.563.640,40 atau 101,59 persen, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, dari target Rp.1.226.494.888.949,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.217.293.801.285,00 atau 99,25 persen dengan rincian:
    - Bagi Hasil Pajak, dari target Rp.16.427.081.588,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.500.338.399,00 atau 100,45 persen;
    - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp.4.705.875.361,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.915.809.645,00 atau 104,46 persen;
    - Dana Alokasi Umum, dari target Rp.811.842.983.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.808.650.245.000,00 atau 99,61 persen.;
    - Dana Alokasi Khusus, dari target Rp.393.518.949.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.387.227.408.241,00 atau 98,40 persen;
  - 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dengan target sebesar Rp.42.872.899.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.51.144.603.000,00 atau 119,29 persen.
  - 3) Transfer Pemerintah provinsi dengan target sebesar Rp.67.966.185.164,00 dengan realisasi sebesar Rp.90.192.159.355,40 atau 132,70 persen.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp.280.424.707.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.283.717.226.100,00 atau 101,17 persen.



## Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020**  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>228.174.016.623,00</b>	<b>241.470.327.965,34</b>	<b>105,83</b>
1.1 Pajak Daerah	105.679.635.430,00	115.543.741.226,00	109,33
1.2 Retribusi Daerah	73.414.583.729,00	66.507.429.022,99	90,59
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.020.000.000,00	4.342.158.893,00	86,50
1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	44.059.797.464,00	55.076.998.823,35	125,01
<b>2 Pendapatan Transfer</b>	<b>1.337.333.973.113,00</b>	<b>1.358.630.563.640,40</b>	<b>101,59</b>
2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.226.494.888.949,00	1.217.293.801.285,00	99,25
2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	42.872.899.000,00	51.144.603.000,00	119,29
2.4 Transfer Pemerintah Provinsi	67.966.185.164,00	90.192.159.355,40	132,70
<b>3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>280.424.707.400,00</b>	<b>283.717.226.100,00</b>	<b>101,17</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.845.932.697.136,00</b>	<b>1.883.818.117.705,74</b>	<b>102,05</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2020.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- Rasio sarana dan prasarana operasional pendataan dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai.
- Kemampuan SDM pengelola PAD, khususnya BUMD masih perlu ditingkatkan.

Dengan segenap daya dan upaya, realisasi **Pendapatan Asli Daerah** tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan, yakni pada tahun 2019 sebesar Rp.238.239.570.974,67 menjadi Rp.241.470.327.965,34 pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.3.230.756.990,67 atau 1,36 persen. Untuk tahun anggaran 2020 **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** ditargetkan sebesar Rp.228.174.016.623,00 terealisasi sebesar Rp.241.470.327.965,34 atau sebesar 105,83 persen.

**Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa, Tahun 2020**  
(dalam Rupiah)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2020	228.174.016.623,00	241.470.327.965,34	105,83

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2020.



## Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Khusus untuk kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode 2019-2020 memperoleh hasil yang cukup menggembirakan, yaitu pada tahun 2019 yang targetnya sebesar Rp. 13.379.635.430,00 milyar lebih, dapat terealisasi sebesar Rp. 13.744.239.789,00 milyar lebih atau sebesar 102,73 persen, sedangkan pada tahun 2020 dengan perencanaan target sebesar Rp. 13.379.635.430,00 milyar lebih, dapat terealisasi sebesar Rp. 14.841.128.860,00 milyar lebih atau sebesar 110,92 persen.

Dengan demikian pada kurun tahun 2019-2020 telah berhasil mencapai target diatas seratus persen Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

**Tabel 2.3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gowa, Tahun 2018-2019**  
(Dalam Rupiah)

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2019	13.379.635.430,00	13.744.239.789,00	102,73
2	2020	13.379.635.430,00	14.841.128.860,00	110,92

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2020.

## 2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2020 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

### 2. Target dan Realisasi Belanja

#### • Belanja

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.987.739.942.507,36 dan terealisasi sebesar Rp.1.882.409.690.018,55 atau 94,70 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.560.288.726.143,85 yang terealisasi sebesar Rp.1.475.424.628.776,89 atau 94,56 persen dari yang dianggarkan.

#### b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2020 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.389.647.163.137,40 dengan realisasi sebesar Rp.370.452.454.170,66 atau 95,07 persen dari yang dianggarkan.



## Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.36.128.609.526,11 dengan realisasi sebesar Rp.35.458.048.000,00 atau 98,14 persen dari yang dianggarkan.

### d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.1.675.443.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.074.559.071,00 atau 64,14 persen dari yang dianggarkan.

**Tabel 2.4 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.560.288.726.143,85</b>	<b>1.475.424.628.776,89</b>	<b>94,56</b>
1.1	Belanja Pegawai	806.562.159.545,46	746.264.722.798,00	92,52
1.2	Belanja Barang dan Jasa	430.528.222.548,25	407.459.217.961,00	94,64
1.3	Belanja Hibah	90.564.636.031,00	89.602.030.000,00	98,94
1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.067.550.000,00	2.532.500.000,00	82,56
1.5	Belanja Bantuan Keuangan	229.566.158.019,14	229.566.158.017,89	100,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>389.647.163.137,40</b>	<b>370.452.454.170,66</b>	<b>95,07</b>
2.1	Belanja Modal Tanah	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.933.260.727,80	39.192.130.203,00	80,09
2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	108.961.365.778,19	106.905.530.955,82	98,11
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	216.627.561.061,41	209.235.275.663,84	96,59
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.884.125.570,00	14.880.402.848,00	99,97
2.6	Belanja Aset Lainnya	239.850.000,00	239.114.500,00	99,69
<b>3.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>36.128.609.526,11</b>	<b>35.458.048.000,00</b>	<b>98,14</b>
<b>4.</b>	<b>Transfer</b>	<b>1.675.443.700,00</b>	<b>1.074.559.071,00</b>	<b>64,14</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.987.739.942.507,36</b>	<b>1.882.409.690.018,55</b>	<b>94,70</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2020.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:



- a. Aturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.
- b. Kurang dan terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai bidang akuntansi terutama dalam pengelolaan keuangan untuk tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/belanja.
- c. Kurangnya perhatian SKPD apabila ada penerapan regulasi dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan dapat berlaku lama.
- b. Merekrut sumber daya manusia yang menguasai bidang akuntansi, memberikan pelatihan dan atau pendidikan formal bidang pengelolaan keuangan daerah secara umum dan akuntansi secara khusus.
- c. Melakukan sosialisasi dan atau pembagian perundang-undangan juknis/juklak kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

### **2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Adapun pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 terdiri atas Penerimaan Daerah atas pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.195.921.488.749,07 yang mana dapat terealisasi sebesar Rp.188.093.015.464,84 atau 96,00 persen dari target yang direncanakan, sedangkan Pengeluaran Daerah atas pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.40.500.000.000,00 terealisasi 100 persen.





**BAB III  
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1.1 URUSAN KONKRUEAN**

**1. RINGKASAN URUSAN WAJIB**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib dibedakan atas dua, yakni urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

**1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

**1. URUSAN PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan salah satu fokus pelaksanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa.

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah organisasi perangkat daerah/instansi yang melaksanakan urusan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.223 orang termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pendidikan dapat terwujud.

• ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020***

***a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran***

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.479.630.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.273.873.800,00 atau 86,09% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.76.080.590,00 atau 82,34% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.399.267.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.337.196.031,00 atau 84,45% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.760.392.425,00 dan terealisasi sebesar Rp.647.121.200,00 atau 85,10% dari alokasi anggaran.
- Administrasi Umum Operasional Korwil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.227.570.875,00 dan terealisasi sebesar Rp.213.475.979,00 atau 93,81% dari alokasi anggaran.



**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.744.173,32 dan terealisasi sebesar Rp.214.544.100,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.265.773,32 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.278.400,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.000.000,00 atau 98,21% dari alokasi anggaran.

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.279.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.198.286.000,00 atau 93,85% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.365.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.93.429.000,00 atau 96,95% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan dan Pelaporan Anggaran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.246.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.969.000,00 atau 98,16% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Profile Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.667.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.888.000,00 atau 80,78% dari alokasi anggaran.

**d. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini, melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.692.562.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.641.262.500,00 atau 92,59% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.660.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.609.300.000,00 atau 92,23% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Dapodik PAUD dan DIKMAS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.962.500,00 dan terealisasi 100 % dari alokasi anggaran.



**e. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan dasar lanjutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.914.698.407,26 dan terealisasi sebesar Rp.106.307.470.705,13 atau 97,61% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mobiler Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi.anggaran.
- Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.479.052,00 dan terealisasi sebesar Rp.216.355.071,00 atau 98,13% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD/MI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.625.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.446.478.000,00 atau 88,99% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP/MTS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.717.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.648.119.000,00 atau 90,29% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Dana Bos, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.642.832.804,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.227.772.500,00 atau 99,60% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.064.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.888.000,00 atau 24,10% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.383.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.012.500,00 atau 30,00% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Gedung Sekolah SD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.724.759.551,26 dan terealisasi sebesar Rp.1.717.845.634,13 atau 99,60% dari alokasi anggaran.

**f. Program Pendidikan Non Formal**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak usia sekolah serta tenaga pendidik informal di luar jalur pendidikan formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.331.321.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.270.815.760,00 atau 81,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemberdayaan Tenaga Pendidikan dan Non Formal (PAUD SPAS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.884.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.123.184.400,00 atau 95,58% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.900.050,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi.anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pendidikan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.237.500,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi.anggaran.
- Penyelenggaraan BOP Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.147.631.360,00 atau 96,30% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi dan pengakuan terhadap tenaga pendidik di semua tingkatan pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.819.697.228,00 dan terealisasi sebesar Rp.558.061.241,00 atau 68,08% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Propesi Pendidik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.500.000,00 atau 86,05% dari alokasi anggaran.
- Pemantapan Model Mata Pelajaran Iman dan Taqwa (IMTAQ) Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.143.800.000,00 atau 66,98% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.161.915.000,00 atau 96,33% dari alokasi anggaran.
- Pemantapan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.349.977.228,00 dan terealisasi sebesar Rp.211.001.241,00 atau 60,29% dari alokasi anggaran.
- Program Pengembangan Pusat Belajar Guru (PBG) Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.845.000,00 atau 34,92% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Program ini bertujuan meningkatkan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.064.229.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.009.199.650,00 atau 48,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.733.716.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.847.490.400,00 atau 48,88% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Naskah Ujian UAN/UAS dan Buku Raport, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.913.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.42.660.000,00 atau 28,27% dari alokasi anggaran.
- Penghargaan Siswa Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah Berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.032.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.111.282.000,00 atau 74,67% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis English Camp, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.450.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi.anggaran.
- Pengembangan Sentra Edukasi Gowa Kabupaten Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.117.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.767.250,00 atau 95,69% dari alokasi anggaran.

### **i. Program DAK Bidang Pendidikan**

Program ini bertujuan memperlancar kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.901.976.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.35.469.945.786,00 atau 88,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Gedung SD / SLB (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.614.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.898.430.000,00 atau 95,93% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Gedung SMP (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.761.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.761.800.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SD / SLB (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.272.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.614.928.159,00 atau 70,20% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SMP (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.659.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.614.151.672,00 atau 93,07% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sistem Pendidikan Non Formal (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.802.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.789.916.560,00 atau 98,40% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana TK PAUD Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.639.673.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TK PAUD Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.151.046.395,00 atau 99,80% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Pendidikan yang direncanakan akan dicapai Dinas Pendidikan pada T.A. 2020 sebesar Rp.154.630.139.058,58 dan terealisasi sebesar Rp.145.943.459.542,13 atau 94,38% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.432.901.327.291,45 dan terealisasi sebesar Rp.408.212.960.124,00 atau 94,30% dari alokasi anggaran.



## **2. URUSAN KESEHATAN**

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingginya Angka Harapan Hidup Masyarakat. Kabupaten Gowa yang sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan program Kesehatan Gratis berupaya untuk terus mensejahterakan masyarakat Gowa.

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah instansi yang disertai tugas menangani urusan kesehatan telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.366 orang termasuk tenaga kesehatan di 28 puskesmas dengan 38 jabatan struktural yang diisi oleh 38 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan kesehatan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang diadakan Urusan Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.948.269.226,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.674.654.122,00 atau 95,40% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.894.241.942,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.758.443.335,00 atau 92,83% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.555.393.767,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.555.393.630,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.833.910,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.824.500,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.628.862.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.569.928.900,00 atau 90,63% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.803.937.107,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.725.063.757,00 atau 95,63% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.954.833.413,00 dan terealisasi sebesar Rp.905.950.281,00 atau 94,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.278.913.413,00 dan terealisasi sebesar Rp.251.099.720,00 atau 90,03% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.142.668.151,00 atau 87,46% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.221.860.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.221.335.000,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.287.935.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.287.847.410,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.959.866,00 atau 46,60% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.509.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.103.418.300,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Profil Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.499.800,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.009.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.918.500,00 atau 99,49% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan pada gudang farmasi/apotik bagi pasien yang berkunjung baik itu pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap melalui kegiatan Pengadaan Obat Generik (DAK), dengan alokasi



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

anggaran sebesar Rp.2.613.853.878,00 atau 87,07% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.625.442.330,00 atau 89,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.534.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.80.476.500,00 atau 76,99% dari alokasi anggaran.
- Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Penilaian Puskesmas Berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Program pelayanan Kesehatan Gratis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.159.098.196,47 dan terealisasi sebesar Rp.47.909.848.000,00 atau 97,46% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.266.905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.805.415.897,00 atau 78,65% dari alokasi anggaran.
- Pemahaman Standar dan Instrumen (Akreditasi Puskesmas), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.234.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.828.201.93300 atau 67,08% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hidup sehat masyarakat melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Promosi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.740.000,00 atau 97,42% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.046.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 atau 7,57% dari alokasi anggaran.

### **i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan lingkungan sehat melalui kegiatan Evaluasi Pengelolaan Program Kesling dan STBM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.098.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

### **j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Program ini bertujuan meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.148.832.500,00 dan terealisasi





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.672.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KLB / Wabah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.088.705.500,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.455.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

### **k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan melalui kegiatan Publikasi Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.700.000,00 atau 31,75% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.700.000,00 atau 1,31% dari alokasi anggaran.
- Publikasi Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.000.000,00 atau 99,95% dari alokasi anggaran.

### **l. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin (MASKIN) melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.680.492.914,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.349.694.709,00 atau 94,66% dari alokasi anggaran.

### **m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana RS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.968.824.095,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.118.275.947,00 atau 71,35% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.199.555.000,00 atau 99,78% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.384.149.095,00 dan terealisasi sebesar Rp.634.046.000,00 atau 45,81% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.284.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.284.674.947,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

### **n. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.072.161.704,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.056.129.276,00 atau 99,23% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.379.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.366.531.276,00 atau 96,67% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.349.784.000,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.206.991.704,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.206.094.000,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Penunjang Medis Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.133.720.000,00 atau 98,32% dari alokasi anggaran.

### **o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan pasien khususnya ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan Pelayanan Jaminan Persalinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.574.454.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.881.404.400,00 atau 80,61% dari alokasi anggaran.

### **p. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.581.699.646,00 atau 85,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Jasa Medis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.449.347.168,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.140.905.084,00 atau 87,41% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.796.229.149,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.732.755.566,00 atau 85,22% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Keamanan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.686.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.686.649.996,00 atau 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.168.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.389.000,00 atau 81,74% dari alokasi anggaran.

### **q. Program DAK Bidang Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan yang berasal dari DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.460.192.041,00 dan terealisasi sebesar Rp.63.445.465.230,00 atau 94,05% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.055.608.541,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.706.532.041,00 atau 99,17% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Berat Puskesmas Perawat (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.737.571.672,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.344.500.023,00 atau 95,96% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Mobil Ambulance (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.580.799.890,00 atau 58,08% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.150.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.115.760.000,00 atau 98,89% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.431.643.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.389.857.120,00 atau 97,08% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.297.010.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.283.010.500,00 atau 95,29% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Kesehatan dan BMHP Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.690.628.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.384.741.160,00 atau 88,63% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.697.080.328,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.640.264.496,00 atau 98,79% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Kesehatan yang direncanakan akan dicapai Dinas Kesehatan dan RSUD Syekh Yusuf pada T.A. 2020 sebesar Rp.266.946.284.106,47 dan terealisasi sebesar Rp.242.620.818.485,00 atau 90,89% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Kesehatan dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.470.966.904,61 dan terealisasi sebesar Rp.89.780.453.106,00 atau 95,03% dari alokasi anggaran.

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 148 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

##### a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.972.111.585,00 dan terealisasi sebesar Rp.825.390.574,00 atau 84,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.266.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.205.029,00 atau 73,39% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.289.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.288.200,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.528.125,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.024.960,00 atau 34,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.166.834.000,00 atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.430.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.156.490.000,00 atau 99,68% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.108.149.100,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.638.760,00 dan terealisasi sebesar Rp.169.969.285,00 atau 80,31% dari alokasi anggaran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.354.321.985,80 dan terealisasi sebesar Rp.349.667.038,00 atau 98,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.228.750,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.402.035,80 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.266.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.150.736.253, 00 atau 97,08% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.300.000,00 atau 99,53% dari alokasi anggaran.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.525.360,00 atau 94,15% dari alokasi anggaran.
- d. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung hubungan antar daerah dan jelajah transportasi darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.480.466.496,60 dan terealisasi sebesar Rp.179.463.093.673,76 atau 96,24% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan:

  - Pembangunan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.171.816.142,42 dan terealisasi sebesar Rp.23.354.337.700,00 atau 80,06% dari alokasi anggaran.
  - Pembangunan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.306.007.654,64 dan terealisasi sebesar Rp.4.113.434.067,64,00 atau 77,52% dari alokasi anggaran.
  - Pembangunan Jalan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.800.183.540,12 dan terealisasi sebesar



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.58.800.183.539,12,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

- Pengujian dan Pengendalian Mutu (Laboratorium), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.004.050,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.362.959.492,42 dan terealisasi sebesar Rp.1.355.638.700,00 atau 99,46% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Jalan (Dana Cadangan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.826.495.617,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan saluran drainase melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.470.863.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.180.493.800,00 atau 80,26% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung prasarana transportasi darat untuk kelancaran hubungan darat antar daerah dalam wilayah Kabupaten Gowa dan dengan daerah luar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.865.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.862.147.700,00 atau 99,59% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.709.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.705.857.000,00 atau 99,50% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.156.290.700,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung prasarana transportasi darat untuk kelancaran hubungan darat antar daerah dalam wilayah Kabupaten Gowa dan dengan daerah luar, melalui kegiatan Investigasi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.032.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.007.500,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung peralatan perencanaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana/prasarana wilayah melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.732.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.100.700.000,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.



**i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**

Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan pengairan serta daya dukung sumber daya air jaringan irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.331.267.841,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.301.601.956,00 atau 99,68% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.981.500,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.709.676.769,00 dan terealisasi sebesar Rp.709.676.703,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.392.978,00 dan terealisasi sebesar Rp.116.283.760,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pertanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.845.000,00 atau 83,46% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi dan Konstruksi Jaringan Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.810.573.685,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.808.183.595,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.584.730.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.558.524.189,00 atau 99,60% dari alokasi anggaran.
- Komisi Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.107.209,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

**j. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**

Program ini bertujuan peningkatan pengembangan, pengelola dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.641.264.293,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.640.908.926,85 atau 99,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.212.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.060.000,00 atau 99,21% dari alokasi anggaran.
- Pompanisasi Jaringan Irigasi Sawah Tadah Hujan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. .300.384.42600 dan terealisasi sebesar Rp.300.181.614,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.212.743.503,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Sempadan Sungai dan Sempadan Saluran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.923.864,00 dan terealisasi sebesar Rp.108.923.809,85 atau 100% dari alokasi anggaran.

### **k. Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar masyarakat miskin, melalui kegiatan Program Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.673.247.342,00 dan terealisasi sebesar Rp.669.277.100,00 atau 99,41% dari alokasi anggaran.

#### **1. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini bertujuan menciptakan kepastian atau ketetapan peruntukan ruang melalui kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.327.827.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.102.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.050.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Peraturan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.675.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.

### **m. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang**

Program ini bertujuan meningkatkan penataan ruang sesuai dengan karakteristik dan tata letak daerah agar tercipta kejelasan peruntukkan dan atau pengendalian pemanfaatan kawasan lingkungan, melalui kegiatan Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.327.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **n. Program Perencanaan Pekerjaan Umum Daerah**

Program ini bertujuan peningkatan perencanaan pekerjaan umum daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.485.464.165,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.484.477.165,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Standarisasi Harga Bahan Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.642.500,00 atau 98,15% dari alokasi anggaran.





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Hasil Musrembang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.207.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.207.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Investigasi Data bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Drainase, Air Bersih dan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.666.000,00 atau 98,83% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan/DED Keciaptakaryaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.593.565,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.128.142.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan/Database ke-PU-an, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.248.226.100,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

### **o. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan**

Program ini bertujuan peningkatan sarana dan prasarana keciaptakaryaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.765.122.826,16 dan terealisasi sebesar Rp.26.196.726.755,92 atau 97,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.326.401.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.323.093.500,00 atau 99,75% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Fasilitas Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.116.482.031,19 dan terealisasi sebesar Rp.15.074.379.690,95 atau 99,72% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Penataan Pedestrian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.699.374.352,23 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.773.348.592,74 dan terealisasi sebesar Rp.5.358.517.392,74 atau 92,81% dari alokasi anggaran.
- Bantuan Rehabilitasi Sedang / Berat Fasilitas Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.849.516.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.741.361.820,00 atau 87,27% dari alokasi anggaran.

### **p. Program Pengembangan sarana dan Prasarana Air Bersih / Air Minum**

Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan pengairan serta daya dukung sumber daya air jaringan irigasi melalui Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih/Air Minum (DAK-Penugasan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.318.478.200,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.



**q. Program Lingkungan Sehat**

Program ini bertujuan peningkatan sehat perumahan melalui kegiatan Pengadaan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.520.646.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.519.975.000,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Sanitasi (DAK) Penugasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.500.171.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.499.500.000,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Sanitasi DAK Penugasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.475.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

**r. Program Kabupaten Sehat**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi Kabupaten Gowa yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja, melalui kegiatan Biaya Operasional Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**s. Program Pendamping Kegiatan**

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pencapaian pelaksanaan pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan kelancaran kegiatan sarana dan prasarana, melalui kegiatan WISMP LOAN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.355.372,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung program/kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.255.577.744.656,56 dan terealisasi sebesar Rp.247.176.153.421,53 atau 96,71% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp .9.909.128.940,41 dan terealisasi sebesar Rp.8.973.197.228,00 atau 90,55% dari alokasi anggaran.

**4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. **Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.387.548.420,00 dan terealisasi sebesar Rp.363.218.579,00 atau 93,72% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.47.177.579,00 atau 86,41% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.639.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.237.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.137.396.000,00 atau 89,08% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.071.920,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.006.000,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.

- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.094.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.157.776.020,00 atau 92,22% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.821.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.532.200,00 atau 92,15% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.653.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.623.820,00 atau 91,59% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.620.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.032.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja aparat melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.075.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.870.000,00 atau 98,72% dari alokasi anggaran.

**e. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.293.742.399,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.193.558.000,00 atau 96,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Identifikasi / Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.694.399,00 dan terealisasi sebesar Rp.99.880.000,00 atau 50,52% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.447.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,00 atau 40,86% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.922.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,00 atau 52,02% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase dalam Mendukung Program Kota Tanpa Kumuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni / BSPS (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.883.678.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.3.896.492.619,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.758.454.599,00 atau 96,46% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.648.906.947,26 dan terealisasi sebesar Rp.2.489.129.537,00 atau 93,97% dari alokasi anggaran.

### 5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sebelumnya merupakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran adalah organisasi pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 58 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

##### a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.555.158.795,50 dan terealisasi sebesar Rp.540.406.838,00 atau 97,34% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.690.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.302.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.45.190.000,00 atau 99,75% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.473.766.295,50 dan terealisasi sebesar Rp.459.126.838,00 atau 96,91% dari alokasi anggaran.

##### b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.521.027.625,00 dan terealisasi sebesar Rp.467.137.300,00 atau 89,66% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.636.875,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.636.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 16,79% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.000.375,00 dan terealisasi sebesar Rp.130.690.300,00 atau 99,01% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.215.375,00 dan terealisasi sebesar Rp.291.236.000,00 atau 97,33% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.625.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.950.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.451.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### d. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.119.000,00 atau 111,49% dari alokasi anggaran.

### e. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengamanan dan pengelolaan tempat bersejarah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.706.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.674.259.750,00 atau 99,52% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.529.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.497.240.000,00 atau 99,50% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.177.019.750,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan kriminalitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.353.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Aparat dan Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **g. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah**

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.24.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program ini melalui kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.930.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.

### **i. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Upaya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.687.643.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.479.939.955,00 atau 87,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemberdayaan Posko Pemadam Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.372.673.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.267.902.314,00 atau 92,37% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.261.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.241.000,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.169.038.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.126.441,00 atau 41,49% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.670.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.117.670.200,00 atau 96,71% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.10.003.711.670,50 dan terealisasi sebesar Rp.9.677.914.093,00 atau 96,74% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.923.974.444,37 dan terealisasi sebesar Rp.5.357.149.900,00 atau 90,43% dari alokasi anggaran.

### 6. URUSAN SOSIAL

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas Urusan Sosial telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 56 orang dengan 33 jabatan struktural yang diisi oleh 33 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan dan Realisasi Tahun 2020**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.990.213.092,00 dan terealisasi sebesar Rp.933.461.419,00 atau 94,27% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.049.392,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.899.255,00 atau 82,15% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.900.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.320.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.903.463.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.853.862.164,00 atau 94,51% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.636.761.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.612.016.366,00 atau 96,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.231.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.230.740.500,00 atau 99,77% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.791.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.176.629.652,00 atau 87,97% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.700.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.149.946.214,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.301.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.282.699.500,00 atau 93,62% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.0.27.355.0000 atau 91,18 % dari alokasi anggaran.
- Pemuktahiran Basis Data Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.271.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp, .255.344.50000 atau 93,89 % dari alokasi anggaran.

### **e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.851.605.680,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.107.538.960,00 atau 220,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Center Termasuk bagi Korban Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.315.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.581.450.000,00 atau 230,88% dari alokasi anggaran.
- Operasionalisasi Tenaga PSKS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.955.680,00 dan terealisasi sebesar Rp.369.838.960,00 atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Difabel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis, Anak Rentan dan Terlantar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.82.250.000,00 atau 92,42% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan melakukan pembinaan terhadap lembaga sosial melalui kegiatan Pembinaan Pilar-pilar Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan/Kejuangan**

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan peran aktif masyarakat agar dapat meningkatkan dan mengembangkan nilai rasa persaudaraan kepahlawanan dan kejuangan antar sesama, sebagai usaha untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat dalam usaha peningkatan rasa kepahlawanan, keberintisan, kejuangan, kesetiakawanan dan retorasi sosial dan mewujudkan penghormatan dan penghargaan kepada jasa- jasa pahlawan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.166.210.000,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Termasuk Jasa petugas Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.630.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Nilai-nilai Kejuangan dan Kepahlawanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.830.000,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Apel Besar Renungan Suci dan Kesetiakawanan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.750.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Pembinaan Keagamaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keagamaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.562.386.514,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.353.903.814,00 atau 86,66% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pencerahan Qalbu Jum'at Ibadah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.789.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.200.898.000,00 atau 94,41% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Syiar Islam dalam Penghayatan Budaya Islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.201.800.000,00 atau 98,42% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Seleksi Tilawati Qur'an (STQ) dan Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.440.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Agama dan Lembaga-lembaga Keagamaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.815.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.622.277.800,00 atau 76,31% dari alokasi anggaran.
- Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.687.514,00 dan terealisasi sebesar Rp.181.488.014,00 atau 99,89% dari alokasi anggaran.

### **i. Program Peningkatan Koordinasi Penyelamatan Korban Bencana Alam**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini serta koordinasi dalam penyelamatan korban bencana alam, melalui kegiatan Koordinasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **j. Program Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan yang bersifat darurat dan peningkatan penyiapan Logistik Kebencanaan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Peralatan dan Logistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial yang direncanakan akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.10.653.536.986,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.600.230.059,00 atau 174,59 % dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.672.154.494,54 dan terealisasi sebesar Rp.4.155.875.082,00 atau 88,95% dari alokasi anggaran.

### 1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

#### 1. URUSAN TENAGA KERJA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, sebagai instansi yang menangani Urusan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 14 jabatan struktural yang diisi oleh 14 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. **Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.593.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.240.107.756,00 atau 97,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.597.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.42.428.956,00 atau 91,06% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.413.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.285.000,00 atau 99,75% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.943.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.805.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.69.151.200,00 atau 99,79% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.535.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.299.600,00 atau 99,62% dari alokasi anggaran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.90.867.000,00 atau 96,95% dari alokasi anggaran. yang terbagi dalam kegiatan :

  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.012.000,00 atau 96,08% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.855.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.250.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.996.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.982.000,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini bertujuan untuk untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi kerja melalui kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.736.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Program ini bertujuan menciptakan meningkatkan kesempatan kerja melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.73.300.500,00 atau 93,87% dari alokasi anggaran.



**g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Program ini bertujuan menciptakan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui kegiatan Wokshop Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.300.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.690.75000 atau 94,60% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja yang direncanakan akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.474.686.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.460.934.006,00 atau 97,10% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.095.105.821,94 dan terealisasi sebesar Rp.2.903.368.177,00 atau 93,81% dari alokasi anggaran.

**2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**  
a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.304.415.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.304.115.000,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.460.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.600.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.160.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.795.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.145.495.000,00 atau 99,79% dari alokasi anggaran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.116.710.000,00 atau 99,75% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.109.710.000,00 atau 99,74% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
- Program ini bertujuan meningkatkan keamanan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui kegiatan Penjangkauan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- e. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui kegiatan Pencapaian Indikator APE, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- f. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan melalui kegiatan Penguatan Forum Anak Kab. Gowa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.100.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.476.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.475.925.000,00 atau 99,88% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.383.038.148,49 dan terealisasi sebesar Rp.1.246.578.330,00 atau 90,13% dari alokasi anggaran.

### 3. URUSAN PANGAN

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Gowa, oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Ketahanan Pangan sebagai instansi teknis pelaksana Urusan Pangan, telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020** **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.254.160.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.248.139.030,00 atau 97,63% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.440.000,00 atau 33,33% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.420.480,00 atau 80,68% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.905.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.904.500,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.935.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.208.374.050,00 atau 97,86% dari alokasi anggaran.

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.618.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.618.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.618.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.618.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.984.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.959.500,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.457.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.447.500,00 atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.527.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.512.000,00 atau 99,82% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan ketahanan pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.413.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.609.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.925.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Pemantauan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.022.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.570.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Koordinasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.667.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Neraca Bahan Makanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.620.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.638.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengujian dan Penerapan Standar Mutu Pangan Segar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.791.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Food Security and vulnerability Atlas (FSVA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.818.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga Bebas Organik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.554.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.577.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi dan Penyuluhan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.142.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Surveilans dan Pengawasan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.465.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Promosi dan Sosialisasi dan Pengankaraman Komsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.970.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.319.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Pangan yang direncanakan akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.476.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.470.768.780,00 atau 98,73% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.575.243.141,38 dan terealisasi sebesar Rp.2.383.842.343,00 atau 92,57% dari alokasi anggaran.



#### **4. URUSAN PERTANAHAN**

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gowa sebagai institusi yang menangani urusan pertanahan telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Urusan pertanahan didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.299.111,00 dan terealisasi sebesar Rp.162.020.269,00 atau 83,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- PENSERTIFIKATAN TANAH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.299.111,00 dan terealisasi sebesar Rp.162.020.269,00 atau 83,82% dari alokasi anggaran.
- PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMDA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Pertanahan yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.194.299.111,00 dan terealisasi sebesar Rp.162.020.269,00 atau 83,39% dari alokasi anggaran.

#### **5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menangani urusan lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.329.486.322,00 dan terealisasi sebesar Rp.321.276.050,00 atau 97,51% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.386.600,00 atau 82,62% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.479.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.927.095,00 atau 98,95% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.825.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.141.822,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.137.355,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.827.596,50 dan terealisasi sebesar Rp.189.030.420,00 atau 79,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.942.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.420.000,00 atau 85,38% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.385.036,50 dan terealisasi sebesar Rp.31.385.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.846.560,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.571.920,00 atau 73,50% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.653.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.500.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.184.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.115.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Renstra, Renja dan RKA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.069.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan di lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemantauan Kualitas Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.550.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan B3 dan Limbah B3, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.100.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.550.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan untuk peningkatan perlindungan serta konservasi sumber daya alam melalui kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.375.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.746.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.825.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.137.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.784.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Peningkatan Pengendalian Polusi**

Program ini bertujuan mengendalikan polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar polusi limbah padat, limbah cair dan udara, serta pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

polusi melalui kegiatan Pengujian Kadar Limbah Padat dan Limbah Cair, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.308.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan sampah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.981.516.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.828.003.333,00 atau 97,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan:

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.482.500,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Sarana Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.877.435.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.877.430.033,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Jasa Pengelolaan Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.869.699.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.716.208.800,00 atau 96,03% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.650.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.230.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Bank Sampah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.002.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, indah dan nyaman melalui kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.167.322.000,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung program/kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.7.832.715.868,50 dan terealisasi sebesar Rp.7.621.145.553,00 atau 97,30% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.032.865.370,55 dan terealisasi



sebesar Rp.2.790.070.715,00 atau 91,99% dari alokasi anggaran.

## **6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sebagai institusi yang diserahi tugas administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, telah memprogramkan berbagai kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.121.772.352,15 dan terealisasi sebesar Rp.1.036.415.406,00 atau 92,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.234.048,00 atau 76,04% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.462.220,00 atau 93,41% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.040.000,00 atau 93,22% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.165.852,15 dan terealisasi sebesar Rp.50.033.101,00 atau 99,74% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.043.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.489.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.005.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.142.537,00 atau 64,06% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.808.989.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.782.971.000,00 atau 96,78% dari alokasi anggaran.



**b. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana  
Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.139.710.000,00 atau 91,44% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.320.000,00 atau 98,75% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.105.800.000,00 atau 89,06% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.590.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  
Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.792.000,00 atau 94,91% dari alokasi anggaran.

**d. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Program ini bertujuan meningkatkan administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.557.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.168.459.025,00 atau 84,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.912.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.842.478,00 atau 66,92% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.115.000,00 atau 99,75% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.087.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.825.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Keliling Akta Catatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.023.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.765.500,00 atau 99,64% dari alokasi anggaran.





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Perekaman KTP Elektrik Offline bagi Penduduk yang Belum Melakukan Perekaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.175.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.175.033.500,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Dokumen dan Fasilitas Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.708.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.449.860.497,00 atau 84,88% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.185.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kerjasama Lintas Sektor Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.936.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.103.880.200,00 atau 79,95% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.269.919.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.196.864.350,00 atau 72,93% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang direncanakan akan dicapai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.3.851.612.352,15 dan terealisasi sebesar Rp.3.363.376.431,00 atau 87,32% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dialokasikan juga anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.609.503.805,22 dan terealisasi sebesar Rp.2.555.283.551,00 atau 97,92% dari alokasi anggaran.

### 7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Untuk menjawab tuntutan masyarakat akan peran dan fungsi masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintahan, sebagai subyek dan obyek pemerintahan dan pembangunan telah dilakukan berbagai program/kegiatan urusan wajib urusan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi teknis pelaksana. Dengan dukungan personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 Orang dengan 16 jabatan struktural yang diduduki oleh 16 orang pejabat. Sarana dan prasarana yang memadai juga mendukung terciptanya pencapaian urusan ini.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.646.911.063,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.002.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.380.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.401.923.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.604.313,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran Rp.57.541.407,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.741.407,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.800.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.350.000,- atau 99,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.950.000,- atau 99,00% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menyusun laporan dan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.947.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pedesaan sebagai obyek dan subyek pemerintahan dan pembangunan, dengan alokasi



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

anggaran sebesar Rp.313.081.700,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.769.200,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan Kader PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.275.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Program PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.037.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.738.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan Reflikasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.267.212.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.980.317.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.317.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.317.750.420,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.071.148.376,79 dan terealisasi sebesar Rp.1.643.468.329,00 atau 79,35% dari alokasi anggaran.

### 8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 37 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 20 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020** **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.418.645.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.391.254.591,00 atau 93,46% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.53.067.991,00 atau 94,90% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.620.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.873.100,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.093.700,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.800.000,00 atau 96,73% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.115.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.032.700,00 atau 99,85% dari alokasi anggaran



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.723.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.192.767.100,00 atau 88,95% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.606.097,00 atau 99,53% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.706.097,00 atau 99,42% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.900.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Fungsi dan Jaringan KB**

Program ini bertujuan meningkatkan fungsi dan jaringan lembaga pelayanan keluarga berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.013.650,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Bakti Sosial TNI KB-Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.409.900,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemutahiran Data Keluarga dan Peserta IKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.776.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Review Pelaksanaan Program KKBPK di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.827.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



**e. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**

Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam pemberian pelayanan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.167.942.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.166.592.000,00 atau 99,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia (POKTAN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.342.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Honor Tenaga Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) bagi PPKBD dan Sub PPKBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.157.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.156.250.000,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran.

**f. Program Penggerakan KIE mengenai KKBPK bagi Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan data dan informasi ,elalui kegiatan Temu Kader (IMP) bagi PPKBD dan Sub PPKBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.980.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran

**g. Program DAK Bidang Keluarga Berencana**

Program ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan serta tugas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.709.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.183.720.624,00 atau 69,24% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Media / Alat Pengolahan Data, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.022.000,00 atau 88,09% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan / Alih Fungsi / Pengembangan Balai Penyuluhan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.489.706.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.483.419.324,00 atau 98,72% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan kendaraan Operasional KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.172.200.000,00 atau 95,67% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana Prasarana Klinik KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.137.500.000,00 atau 68,75% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.234.135.000,00 atau 35,48% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.256.500,00 atau 88,52% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.094.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.100.187.800,00 atau 86,30% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana**

Program ini bertujuan untuk peningkatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.023.384.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.017.212.000,00 atau 99,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.013.696.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Kampung KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.743.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.743.080.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Distribusi Alat kontrasepsi ke Fasyankes, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.516.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Operasional KIE Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.002.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.998.250.000,00 atau 99,63% dari alokasi anggaran.
- Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.732.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.186.670.000,00 atau 98,91% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang direncanakan akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.8.433.565.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.872.578.962,00 atau 93,35% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung, melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.392.846.023,36 dan terealisasi sebesar Rp, .3.010.485.57500 atau 88,73% dari alokasi anggaran.

## **9. URUSAN PERHUBUNGAN**

### **• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Secara umum, kebijakan pembangunan di urusan perhubungan di Kabupaten Gowa diarahkan dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas sehingga diharapkan akan mendukung distribusi barang serta mobilitas penduduk untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya. Dinas



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan pembangunan di urusan perhubungan telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 67 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.513.331,50 dan terealisasi sebesar Rp.245.134.290,00 atau 94,46% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.715.411,50 dan terealisasi sebesar Rp.40.227.383,00 atau 86,11% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.059.000,00 atau 32,37% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.767.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.757.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.113.420,00 dan terealisasi sebesar Rp.140.533.407,00 atau 97,52% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Terminal dan Perpakiran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.557.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.389.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.198.190.000,00 atau 94,65% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.120.010.000,00 atau 99,09% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.565.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.065.000,00 atau 94,66% dari alokasi anggaran.





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.714.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.115.000,00 atau 70,94% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.050.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.425.000,00 atau 97,60% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Renja, RKA, Lakip dan Renstra, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.350.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.336.500,00 atau 99,83% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.900.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.886.500,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.450.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.264.750.000,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Program ini bertujuan menciptakan peningkatan daya dukung sarana dan prasarana tertib berlalulintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.437.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.56.982.250,00 atau 99,21% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.580.250,00 atau 98,89% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.402.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan angkutan khususnya angkutan darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.756.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Forum LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.251.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Angkutan Umum, Barang dan Angkutan Tambang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.505.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **i. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan tertib berlalu lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.607.450,00 dan terealisasi sebesar Rp.147.737.250,00 atau 94,34% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.107.925.000,00 atau 92,46% dari alokasi anggaran.
- Pengamanan Lalu Lintas Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.257.450,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.187.250,00 atau 99,67% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan dan Pemasangan Cermin Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.625.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelaikan pemakaian kendaraan khususnya kendaraan roda dua, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.869.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.217.886.250,00 atau 99,55% dari alokasi anggaran

- Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.519.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.153.789.250,00 atau 99,53% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.64.097.000,00 atau 99,61% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan bidang perhubungan yang direncanakan akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.211.433.581,50 dan terealisasi sebesar Rp.1.175.247.790,00 atau 97,01% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.349.711.214,42 dan terealisasi sebesar Rp.4.789.046.542,00 atau 89,52% dari alokasi anggaran.

### 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi komunikasi dan informasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa, telah merencanakan dan melaksanakan Program/Kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.334.432.432,00 dan terealisasi sebesar Rp.323.695.484,00 atau 96,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.736.300,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.100.000,00 atau 42,00% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.529.000,00 atau 97,54% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.109.235.000,00 atau 99,89% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.106.132,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.095.184,00 atau 96,00% dari alokasi anggaran.

- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.687.846.179,00 dan terealisasi sebesar Rp.677.372.652,00 atau 98,48% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.591.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.589.604.200,00 atau 99,62% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.296.179,00 dan terealisasi sebesar Rp.82.768.452,00 atau 91,66% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.078.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.43.745.875,00 atau 99,25% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.885.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.728.000,00 atau 99,01% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.193.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.28.017.875,00 atau 99,38% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi, informasi dan media massa dan kualitas komunikasi, informasi dan media massa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.239.901.099,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.239.157.700,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet di SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.965.499,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.000.377.700,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Tower, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.000.000,00 atau 99,77% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.172.785.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.172.780.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

Program ini bertujuan meningkatkan kerjasama informasi dengan mas media melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi Situs Website Pemerintah Kab.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.965.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.371.047.000,00 atau 92,54% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Informasi**

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya berlalu lintas serta informasi lain seperti seni, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.590.020.246,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.583.773.370,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyebarluasan Informasi Melalui Radio, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.578.912.746,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.572.665.870,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.107.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Komunikasi Publik melalui Dialog Interaktif Radio, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 adalah sebesar Rp.5.297.243.406,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.238.792.081,00 atau 98,90% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.382.351.781,77 dan terealisasi sebesar Rp.2.970.850.529,00 atau 87,83% dari alokasi anggaran.

## **11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

### **• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan koperasi, usaha kecil dan menengah telah melakukan berbagai program/kegiatan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

### **• Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.486.159,40 dan terealisasi sebesar Rp.258.581.650,00 atau 99,65% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.229.909,00 atau 96,79% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.148.750,40 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.540.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.152.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.71.048.100,00 atau 99,85% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.644.909,00 dan terealisasi sebesar Rp.111.614.891,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.170.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.97.153.700,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.500.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.870.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.853.700,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.245.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.775.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.870.000,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.600.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif**

Program ini melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Kelompok Wirausahamelalui kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Kelompok Wirausaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.253.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.248.290.000,00 atau 97,87% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang direncanakan pada T.A. 2020 sebesar Rp.632.606.759,40 dan terealisasi sebesar Rp.626.270.350,00 atau 99,00% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.085.777.020,40 dan terealisasi sebesar Rp.1.896.787.160,00 atau 90,94% dari alokasi anggaran.

## **12. URUSAN PENANAMAN MODAL**

### **• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sebagai institusi baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 disertai tugas menangani urusan penanaman modal, telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

### **• Program, Anggaran, Kegiatan dan Realisasi Tahun 2020**

#### **a. Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.321.484.550,00 dan terealisasi sebesar Rp.308.209.305,00 atau 95,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.83.914.106,00 atau 86,87% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.055.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.57.976.144,00 atau 99,86% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.829.550,00 dan terealisasi sebesar Rp.166.319.055,00 atau 99,69% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.893.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.559.450,00 atau 98,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.293.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.959.450,00 atau 98,82% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.600.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.550.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.016.750,- dan terealisasi sebesar Rp.6.971.750,- atau 99,36% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.260.000,- atau 98,26% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rencana Penganggaran dan LAKIP SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.716.750,- dan terealisasi sebesar Rp.4.711.750,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan di berbagai sector melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.250.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.178.250,00 dan terealisasi





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.91.144.250,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.060.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.84.042.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.207.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Survey Kepuasan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.911.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.895.000,00 atau 99,59% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Penanaman Modal yang direncanakan akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.480.356.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.466.713.005,00 atau 97,16% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.677.196.233,12 dan terealisasi sebesar Rp.2.484.919.423,00 atau 92,82% dari alokasi anggaran.

### 13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang dengan 13 jabatan struktural yang diisi oleh 13 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.710.559.694,00 dan terealisasi sebesar Rp.567.342.378,00 atau 79,84% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.585.313,00 dan terealisasi sebesar Rp.75.979.127,00 atau 99,21% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.633.974.381,00 dan terealisasi sebesar Rp.491.363.251,00 atau 77,51% dari alokasi anggaran.



**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.825.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.425.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dan pemuda, melalui kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.380.871,00 dan terealisasi sebesar Rp.131.314.800,00 atau 99,95% dari alokasi anggaran.

**d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan serta mengarahkan pemuda ke hal-hal positif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.715.532.522,00 dan terealisasi sebesar Rp.527.783.522,00 atau 73,76% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Aksi Bakti Sosial Kepemudaan (Paskibra), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.309.282.522,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.468.522,00 atau 40,57% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan / Wirausaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.149.205.000,00 atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepemudaan (Pramuka), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.149.210.000,00 atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Kemah Bakti Purna Paskibra), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.103.900.000,00 atau 97,79% dari alokasi anggaran.

**e. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga**

Program ini bertujuan untuk menggiatkan olahraga serta perbaikan organisasi dan manajemen olah raga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.221.190.131,00 dan terealisasi sebesar Rp.219.456.944,00 atau 99,22% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Mutu Organisasi dan Manajemen Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.872.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.90.758.250,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Pekan Olahraga Antar Club, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.317.881,00 dan terealisasi sebesar Rp.128.698.694,00 atau 98,76% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang direncanakan akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.1.806.488.218,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.473.722.644,00 atau 81,58% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.789.468.294,70 dan terealisasi sebesar Rp.2.579.334.954,00 atau 92,47% dari alokasi anggaran.

### 14. URUSAN STATISTIK

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Statistik telah merencanakan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan penelitian dan statistic melalui kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Kompilasi Data Statistik Sektoral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.153.000,00 atau 99,56% dari alokasi anggaran.

### 15. URUSAN PERSANDIAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Persandian telah merencanakan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi**

Program ini bertujuan menyediakan konektivitas dan jaringan yang handal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.312.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.410.000,00 atau 92,02% dari alokasi anggaran. yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemenuhan Pengembangan SDM, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.812.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.948.000,00 atau 85,13% dari alokasi anggaran.
- Operasional dan Pemeliharaan Persandian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.462.000,00 atau 99,31% dari alokasi anggaran.

## **16. URUSAN KEBUDAYAAN**

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Budaya telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**
  - a. **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini bertujuan untuk Pengembangan Kekayaan Budaya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.943.968.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.943.755.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.993.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.611.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.787.000,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Prosesi Upacara 17 Pasukan Ganti Jaga Tubarani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.278.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.277.975.000,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran.



**b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program ini bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan kesenian melalui kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.375.000,00 atau 91,18% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.700.000,00 atau 63,64% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Atraksi Seni Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.675.000,00 atau 93,85% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan yang direncanakan akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.956.443.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.955.130.000,00 atau 99,86% dari alokasi anggaran.

**17. URUSAN PERPUSTAKAAN**

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah institusi yang diserahi tugas Urusan Perpustakaan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gowa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 8 jabatan struktural yang diisi oleh 8 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

**a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.338.187.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.330.242.993,00 atau 97,65% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.841.382,00 atau 80,83% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.309.927.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.307.401.611,00 atau 99,19% dari alokasi anggaran.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.773.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.94.845.400,00 atau 92,29 % dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Program ini bertujuan sebagai pembinaan perpustakaan pemkab Gowa melalui kegiatan Lomba Story Telling, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.755.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Perpustakaan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.461.715.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.425.088.393,00 atau 92,07% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan yang direncanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.464.159.041,90 dan terealisasi sebesar Rp.1.339.258.193,00 atau 91,47% dari alokasi anggaran.

## **18. URUSAN KEARSIPAN**

### **• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai institusi yang disertai tugas Urusan Kearsipan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

### **• Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

#### **a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Program ini bertujuan meningkatkan system administrasi kearsipan melalui kegiatan Penyusunan Regulasi Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.056.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.633.750,00 atau 77,27 % dari alokasi anggaran.

## **3.1.2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN**

### **1. URUSAN PERIKANAN**

#### **• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gowa sebagai instansi teknis yang menangani Urusan Perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sebagai dinas baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Dinas Perikanan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan 15 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.382.729.844,00 dan terealisasi sebesar Rp.363.775.687,00 atau 95,05% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.209.369,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.038.212,00 atau 75,21% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.040.000,00 atau 85,00% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.469.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.346.750,00 atau 99,07% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.650.725,00 dan terealisasi sebesar Rp.196.350.725,00 atau 98,84% dari alokasi anggaran.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.60.366.190,00 atau 95,24% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.53.986.190,00 atau 94,71% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.380.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.176.505.000,00 atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Produksi Balai Benih Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.69.825.000,00 atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Kemitraan Pembudidaya Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.680.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



**d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan perikanan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Nelayan Skala Kecil di Perairan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.632.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Pembinaan Usaha**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui kegiatan Pembinaan Produksi Bernilai Tambah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**f. Program Pemberdayaan Sumber Daya Perairan Umum**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan pemberdayaan ekosistem perikanan melalui kegiatan Perlindungan, Monitoring, Pengendalian dan Peningkatan Sumber daya Perairan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.810.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**g. Program Pemberdayaan Kelompok Perikanan**

Program ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berprofesi di bidang perikanan melalui kegiatan Lomba Kinerja Kelompok Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.322.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**h. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Perikanan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.520.458.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.480.992.000,00 atau 97,40 % dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan urusan perikanan yang direncanakan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.2.184.922.844,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.123.403.877,00 atau 97,18% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Urusan Perikanan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.741.803.249,17 dan terealisasi sebesar Rp.2.542.572.941,00 atau 92,73% dari alokasi anggaran.

**2. URUSAN PERTANIAN**

**• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Gowa, oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai instansi teknis pelaksana urusan pilihan bidang pertanian, telah merencanakan dan melaksanakan





berbagai program/kegiatan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 116 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Sedangkan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**  
**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.880.190.859,00 dan terealisasi sebesar Rp.820.101.017,00 atau 93,17% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.86.511.949,00 atau 71,59% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.550.000,00 atau 96,78% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319.599.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.301.564.768,00 atau 94,36% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.951.859,00 dan terealisasi sebesar Rp.394.474.300,00 atau 98,38% dari alokasi anggaran.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.891.152,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.656.000,00 atau 97,42% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.855.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.621.000,00 atau 95,04% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.036.152,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.035.000,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.47.940.000,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran.

### **d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bidang tanaman pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.427.473.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.404.341.000,00 atau 94,59% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.907.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.74.407.500,00 atau 90,84% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.115.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.343.450.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.327.818.500,00 atau 95,45% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bidang hortikultura, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.251.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Difersifikasi Tanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.396.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Kentang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.415.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hias, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.440.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.340.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



**g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan prasarana dan sarana melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.420.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura**

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.247.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan**

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.038.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**j. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kelestarian sumber daya pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.939.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.937.600.000,00 atau 99,83% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.177.600.000,00 atau 99,09% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkebunan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.760.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**k. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani dalam pengolahan lahan pertanian melalui kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.815.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.185.000,00 atau 92,99% dari alokasi anggaran.

**l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana**

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.1.301.520.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **m. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan ketersediaan pangan dalam masyarakat, melalui kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **n. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, melalui kegiatan Orientasi Teknis dan Lokakarya Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.629.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **o. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.213.159.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.220.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.320.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.619.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **p. Program Peningkatan Hasil Peternakan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian di bidang peternakan, melalui kegiatan Peningkatan Inseminasi Buatan (IB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.361.250,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.3.993.560.761,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.903.788.767,00 atau 97,75% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.479.860.660,10 dan terealisasi sebesar Rp.15.089.756.130,00 atau 91,56% dari alokasi anggaran.



### 3. URUSAN PARIWISATA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menangani bidang kepariwisataan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dengan 15 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.084.145,60 dan terealisasi sebesar Rp.194.484.045,00 atau 99,18% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.865.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.219.145,60 dan terealisasi sebesar Rp.107.619.045,00 atau 98,53% dari alokasi anggaran.

- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.211.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.816.000,00 atau 99,13% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.611.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.216.000,00 atau 99,03% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.600.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

- c. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.178.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.014.000,00 atau 99,10% dari alokasi anggaran.

- d. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan informasi potensi obyek wisata, seni budaya dan adat istiadat masyarakat lokal kepada masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.522.700,00 dan



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

teralisasi sebesar Rp.216.370.400,00 atau 99,47% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.772.700,00 dan teralisasi sebesar Rp.121.370.400,00 atau 99,67% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.750.000,00 dan teralisasi sebesar Rp.70.000.000,00 atau 98,94 % dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

### e. **Program Pengembangan Kemitraan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan kerjasama pengembangan kepariwisataan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan atau masyarakat melalui kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerja Sama dengan Lembaga Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.344.050.000,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran untuk seluruh Program/Kegiatan di urusan Pariwisata yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.821.045.845,60 dan teralisasi sebesar Rp.248.307.045,00 atau 30,24% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.082.267.545,69 dan teralisasi sebesar Rp.2.816.632.134,00 atau 91,38% dari alokasi anggaran.

## 4. URUSAN PERDAGANGAN

### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan perdagangan, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang dengan 19 jabatan struktural yang diisi oleh 19 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

#### a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.713.711.127,00 dan teralisasi sebesar



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.676.502.691,00 atau 94,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.296.797,00 atau 62,86% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.291.910,00 atau 71,53% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.076.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.142.813.750,00 atau 98,44% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.263.392.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.260.615.383,00 atau 98,95% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.641.877,00 dan terealisasi sebesar Rp.217.484.851,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.384.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.984.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.812.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.64.706.500,00 atau 99,84% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program ini bertujuan menciptakan perlindungan terhadap konsumen dari praktek-praktek perdagangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan merugikan konsumen melalui kegiatan Tera / Tera Ulang / UTTP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.916.000,00 dan



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

teralisasi sebesar Rp.36.233.500,00 atau 75,62% dari alokasi anggaran.

**e. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pengembangan usaha masyarakat melalui kegiatan Pendataan Komoditi Ekspor dan Pemantauan Barang Impor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.770.000,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

**f. Program Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan**

Program ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di bidang usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.324.003.900,00 dan teralisasi sebesar Rp.2.289.389.750,00 atau 98,51% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Operasional Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.899.650,00 dan teralisasi sebesar Rp.596.124.900,00 atau 97,26% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan / Pendataan Izin Usaha Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.828.000,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp.1.583.487.000,00 atau 98,97% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi dan Penataan Pedagang Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.178.250,00 dan teralisasi sebesar Rp.16.854.850,00 atau 92,72% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Pasar Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.098.000,00 dan teralisasi sebesar Rp.87.095.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

**g. Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan**

Program ini melalui kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.714.000,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

**h. Program Peningkatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan proses distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Sembako, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.403.500,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

**i. Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perdagangan komoditas asli daerah, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Gudang (SRG) / Gudang Swasta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.166.250,00 dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran untuk seluruh Program/Kegiatan di urusan Perdagangan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Gowa





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten Gowa Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.3.351.881.277,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.268.270.191,00 atau 97,51 % dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.388.928.056,48 dan terealisasi sebesar Rp.3.022.788.944,00 atau 89,20% dari alokasi anggaran.

### 5. URUSAN PERINDUSTRIAN

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai instansi teknis yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan bidang perindustrian, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

##### **a. Program Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk pengrajin melalui kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan (Sablon), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.588.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

##### **b. Program Penataan Struktur Industri**

Program ini melalui kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Usaha Industri di Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.301.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

##### **c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program ini melalui kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Usaha Industri di Kabupaten Gowa, melalui kegiatan Bantuan Mesin / Alat Bagi IKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.436.640,00 dan terealisasi sebesar Rp.165.960.000,00 atau 99,71% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.199.326.390,00 dan terealisasi sebesar Rp.198.849.750,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran.

### 6. URUSAN TRANSMIGRASI

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan Pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Gowa, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan daerah permukiman transmigrasi melalui kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Warga Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.383.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan urusan Transmigrasi yang direncanakan akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.11.383.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **3.1.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Barombong, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Manuju.

Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 139 orang dengan 48 jabatan struktural yang diisi oleh 48 pejabat struktural; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural; 18 kecamatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 516 termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di kelurahan dan bertindak selaku Sekretaris Desa. Jumlah seluruh jabatan struktural di 18 kecamatan adalah 392 jabatan struktural yang diisi oleh 313 pejabat.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.947.015.749,70 dan terealisasi sebesar Rp.23.972.713.449,00 atau 96,09 % dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.965.660,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.318.444,00 atau 53,35% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.410.144.798,36 dan terealisasi sebesar Rp.3.168.468.724,00 atau 92,91% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.816.023.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.813.685.000,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.640.000,00 atau 93,20% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.458.523.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.455.315.238,00 atau 99,30% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.113.483.840,00 atau 57,24% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.741.527.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.705.842.500,00 atau 95,19% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.370.348.960,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.354.691.938,00 atau 98,86% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.273.381.670,00 dan terealisasi sebesar Rp.272.938.255,00 atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.351.333.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.341.609.000,00 atau 97,23% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.194.135.900,00 atau 98,63% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.304.170.216,00 dan terealisasi sebesar Rp.303.140.250,00 atau 99,66% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.343.731.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.343.018.200,00 atau 99,79% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.786.403.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.639.025.322,00 atau 97,83% dari alokasi anggaran.
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.409.885.343,50 dan terealisasi sebesar Rp.365.886.805,00 atau 89,27% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.947.601.859,34 dan terealisasi sebesar Rp.5.734.860.403,00 atau 96,42% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.235.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.883.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Humas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Sub Bagian Perbendaharaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.182.002,50 dan terealisasi sebesar Rp.78.164.000,00 atau 97,48% dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Sub Bagian Pembukuan dan Verivikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.653.550,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.614.000,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran.
  - Honorarium Pegawai Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.977.547.440,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.820.357.630,00 atau 92,05% dari alokasi anggaran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.896.674.866,80 dan terealisasi sebesar Rp.12.816.894.480,00 atau 99,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :
- Pembangunan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.044.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.243.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.743.300,00 atau 57,66% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.116.736.000,00 atau 99,39% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.697.849.205,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.686.948.954,00 atau 99,36% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Meubeler, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.42.900.000,00 atau 99,77% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.617.153.234,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.610.795.900,00 atau 99,61% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.170.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.206.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.181.337.900,00 atau 98,87% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.498.360.603,80 dan terealisasi sebesar Rp.3.486.232.466,00 atau 99,65% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107.876.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.107.850.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.475.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.950.000,00 atau 71,29% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.297.887.524,00 dan terealisasi sebesar Rp.297.840.960,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.914.000,00 atau 99,71% dari alokasi anggaran.



**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi kerja aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.371.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.367.575.000,00 atau 98,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.289.325.000,00 atau 98,64 % dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.250.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.750.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.453.103.003,00 dan terealisasi sebesar Rp.450.832.197,00 atau 99,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.457.974,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.457.447,00 atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Renstra, Renja dan RKA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.755.854,00 dan terealisasi sebesar Rp.45.246.000,00 atau 98,89% dari alokasi anggaran.
- Penatausahaan dan Pelaporan BMD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.319.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.99.856.000,00 atau 99,54% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.029.025,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.016.000,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.488.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.131.220.000,00 atau 99,04% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Informasi LPPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.937.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.207.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.777.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.761.250,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Monev SAKIP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.131.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.473.227.957,15 dan terealisasi sebesar Rp.17.564.964.397,00 atau 90,20% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.57.642.100,00 atau 93,36% dari alokasi anggaran.
- Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.478.941.960,00 dan terealisasi sebesar Rp.442.675.000,00 atau 92,43% dari alokasi anggaran
- Rapat-rapat Paripurna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.077.000,00 atau 96,89% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Reses, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.206.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.024.024.500,00 atau 84,87% dari alokasi anggaran.
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.899.451.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.727.476.400,00 atau 80,88% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.254.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.860.293.997,00 atau 90,86% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.445.964.997,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.363.684.000,00 atau 94,31% dari alokasi anggaran.
- Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.900.000,15 dan terealisasi sebesar Rp.23.091.400,00 atau 39,88% dari alokasi anggaran.



**g. Program Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan**

Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.125.000,00 atau 97,27% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Kecamatan Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.825.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Dana Kelurahan dan Dana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.300.000,00 atau 96,95% dari alokasi anggaran.

**h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.550.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

**i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Program ini bertujuan untuk pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.337.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.291.449.365,00 atau 86,48% dari alokasi anggaran.

**j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Program ini bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi baik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemerintah dengan pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.943.093.101,00 dan terealisasi sebesar Rp.893.677.000,00 atau 94,76% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.742.618.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.696.343.000,00 atau 93,77% dari alokasi anggaran.
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.475.101,00 dan terealisasi sebesar Rp.197.334.000,00 atau 98,43% dari alokasi anggaran.

**k. Program Peningkatan Kegiatan Pemerintahan**

Program ini bertujuan meningkatkan dan evaluasi pelayanan pemerintahan pada tingkat Pemerintah Desa/Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.928.350,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyelesaian Masalah Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.737.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penegasan Batas Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.128.050,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.062.800,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **l. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan melalui kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.381.313,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.087.000,00 atau 79,89% dari alokasi anggaran.

### **m. Program Pembinaan Keagamaan**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pembinaan keagamaan, melalui kegiatan Temu Koordinasi Bidang Mental dan Spritual, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.300.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **n. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.677.988.963,11 dan terealisasi sebesar Rp.1.601.393.348,00 atau 95,44% dari alokasi anggaran.

### **o. Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD, melalui kegiatan Penunjang Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.501.880,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **p. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengadaan barang dan jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.917.969.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.889.409.538,00 atau 96,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penunjang Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.794.056.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.767.879.500,00 atau 96,70% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.094.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.43.665.000,00 atau 99,03% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.903.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.715.250,00 atau 95,74% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.913.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.149.788,00 atau 98,53% dari alokasi anggaran.

### q. **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Program ini bertujuan menciptakan transparansi, pedoman dan kekuatan hukum pelaksanaan program/kebijakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.679.119.173,00 dan terealisasi sebesar Rp.672.723.015,00 atau 99,06% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.219.394.000,00 atau 99,66% dari alokasi anggaran.
- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.267.517.073,00 dan terealisasi sebesar Rp.267.155.185,00 atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.918.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.140.518.100,00 atau 96,96% dari alokasi anggaran.
- Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.590.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.956.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.077.730,00 atau 97,16% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Penanganan RANHAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.988.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### r. **Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan pada organisasi perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.123.937.500,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan Kualitas Pelayanan Unit Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.39.773.000,00 atau 99,49% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.945.500,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pengaduan Unit Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.933.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.42.869.000,00 atau 99,85% dari alokasi anggaran.
- Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.350.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### s. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan penataan struktur kelembagaan serta terbinanya perpustakaan Sekretariat Daerah melalui kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.056.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.

### t. **Program Pembinaan Ketenagalistrikan**

Program ini bertujuan peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.365.841.290,92 dan terealisasi sebesar Rp.23.860.349.819,00 atau 97,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.285.841.290,92 dan terealisasi sebesar Rp.22.814.949.819,00 atau 97,98% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Penunjang Penerangan Jalan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.080.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.045.400.000,00 atau 96,80% dari alokasi anggaran.

### u. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, melalui kegiatan Penunjang Kegiatan Pengendalian Adm. Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.983.750,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.

### v. **Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan perdagangan dalam wilayah Kabupaten Gowa, melalui kegiatan Penunjang Kegiatan Administrasi Perekonomian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.969.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.949.000,00 atau 85,41% dari alokasi anggaran.

### w. **Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah secara bertahap melalui kerja sama antar daerah melalui kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dan Penyediaan Pelayanan Publik, dengan



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

alokasi anggaran sebesar Rp.56.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.212.000,00 atau 97,82% dari alokasi anggaran.

**x. Program Peningkatan Layanan Keprotokoleran**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan protokoler, melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Keprotokoleran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.496.732,50 dan terealisasi sebesar Rp.95.028.000,00 atau 96,48% dari alokasi anggaran.

**y. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**

Program ini melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.677.990.604,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.595.559.531,00 atau 95,09% dari alokasi anggaran.

**z. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

Program ini melalui kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.241.647.612,06 dan terealisasi sebesar Rp.19.786.547.507,00 atau 88,96% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan yang direncanakan akan dicapai dalam pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 adalah sebesar Rp.111.652.491.146,24 dan terealisasi sebesar Rp.105.416.497.046,00 atau 94,41% dari alokasi anggaran.

Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.690.359.681,06 dan terealisasi sebesar Rp.68.497.251.508,00 atau 90,50% dari alokasi anggaran.

## 2. PENGAWASAN

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan internal terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dengan 9 jabatan struktural yang diisi oleh 9 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

**a. Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.436.483.712,00 dan terealisasi sebesar Rp.426.175.143,00 atau 97,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.800.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.114.945.493,00 atau 95,24% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.442.750,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.909.940,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.900.000,00 atau 99,80% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.300.000,00 atau 77,94% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.311.022,00 dan terealisasi sebesar Rp.233.256.900,00 atau 98,71% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Pelaporan Hasil Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.530.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.591.364.082,00 dan terealisasi sebesar Rp.587.425.000,00 atau 99,33% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.206.082,00 dan terealisasi sebesar Rp.154.000.000,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.658.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.165.600.000,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.260.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.256.325.000,00 atau 98,59% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.500.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi kerja aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.127.950.000,00 atau 98,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.500.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.69.450.000,00 atau 98,09% dari alokasi anggaran.

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.63.332.000,00 atau 98,36% dari alokasi anggaran. yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.346.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.054.000,00 atau 96,88% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.346.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.340.000,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.698.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.938.000,00 atau 98,34% dari alokasi anggaran.

**e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Program ini bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi baik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemerintah dengan pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.304.808.056,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.235.850.284,00 atau 97,01% dari alokasi anggaran. yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeriksaan Reguler SKPD Kabupeten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.188.530.000,00 atau 97,49% dari alokasi anggaran.
- Pemeriksaan Reguler Sekolah dan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.165.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.209.930.000,00 atau 99,42% dari alokasi anggaran.
- Pemeriksaan Reguler Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.170.635.000,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Reviu Pelaporan Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.350.405.000,00 atau 99,83% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Tujuan Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.430.320.056,00 dan terealisasi sebesar Rp.407.005.084,00 atau 94,58% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi dan Monitoring, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.412.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.410.145.000,00 atau 99,31% dari alokasi anggaran.
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.313.155.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.310.405.000,00 atau 99,12% dari alokasi anggaran.
- Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.138.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.39.097.000,00 atau 90,63% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.935.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.968.200,00 atau 83,93% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.300.000,00 atau 86,46% dari alokasi anggaran.
- Pendampingan dan Asistensi Aparat Fungsional Pengawasan Internal/Eksternal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.430.000,00 atau 78,95% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.990.000,00 atau 79,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.410.000,00 atau 85,25% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Teknis Pengawasan (in House Training), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.150.000,00 atau 49,83% dari alokasi anggaran.
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.430.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Pengawasan yang direncanakan akan dicapai Inspektorat Kabuapten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.3.587.625.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.489.722.427,00 atau 97,27% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.917.459.849,91 dan terealisasi sebesar Rp.3.009.986.172,00 atau 103,17% dari alokasi anggaran.

### 3. PERENCANAAN

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

##### a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.716.464.355,60 dan terealisasi sebesar Rp.698.845.818,00 atau 97,54% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.010.575,60 dan terealisasi sebesar Rp.84.732.627,00 atau 92,09% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.009.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.997.000,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.747.280,00 dan terealisasi sebesar Rp.224.517.191,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.378.697.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.368.590.000,00 atau 97,33% dari alokasi anggaran.

##### b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.596.776,00 dan terealisasi sebesar Rp.136.480.731,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.847.579,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.845.000,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.749.197,00 dan terealisasi sebesar Rp.90.635.731,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.442.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.192.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.250.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### d. **Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memadukan perencanaan infrastruktur lingkungan perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.727.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.138.085.200,00 atau 79,48% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.367.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.336.500,00 atau 99,42% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.759.700,00 atau 17,90% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.989.000,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

### e. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan meningkatkan sistem perencanaan yang komprehensif antar semua unit kerja secara *bottom up* dan *top down*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.311.326.993,00 dan terealisasi sebesar Rp.286.643.000,00 atau 92,07% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rancangan RKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.28.525.000,00 atau 99,65% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyelenggaraan Musrembang RKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.64.250.000,00 atau 73,98% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.300.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Forum SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.625.000,00 atau 81,95% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.250.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Berbasis Aplikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.078.993,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.995.000,00 atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rancangan RPJMD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.698.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung penciptaan iklim usaha yang sehat dan adil untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.724.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.77.191.200,00 atau 62,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengkajian dan evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TPID, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.408.400,00 atau % dari alokasi anggaran.
- Perencanaan dan Pembinaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.784.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.782.800,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan menciptakan katalisasi pembangunan potensi sumber daya manusia yang mandiri, bermoral dan sejahtera, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.556.28400 dan terealisasi sebesar Rp.74.556.184,00 atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan Operasional Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Musrembang Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.698.184,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Musrembang Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.558.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.558.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Perencanaan yang direncanakan akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.1.572.837.908,60 dan terealisasi sebesar Rp.1.448.244.133,00 atau 92,08% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.406.546.798,38 dan terealisasi sebesar Rp.2.268.020.277,00 atau 94,24% dari alokasi anggaran.

### 4. KEUANGAN

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi urusan keuangan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 55 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

##### a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.845.872.740,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.791.397.383,00 atau 97,05% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.994.233,00 atau 89,58% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.701.497.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.682.675.000,00 atau 97,32% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.510.000,00 atau 99,27% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.693.000,00 atau 99,35% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.402.200,00 atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.830.000,00 atau 93,01% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.455.851.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.440.252.300,00 atau 96,58% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.481.329.740,00 dan terealisasi sebesar Rp.473.040.650,00 atau 98,28% dari alokasi anggaran.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.406.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.346.903.810,00 atau 85,33 % dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.96.370.000,00 atau 98,84% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.265.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.191.791.810,00 atau 76,64% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.742.000,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.82.600.000,00 atau 98,33% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.350.000,00 atau 98,33% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.250.000,00 atau 98,33% dari alokasi anggaran.



**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.237.686.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.237.513.000,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.673.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.53.653.000,00 atau 99,96 % dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.566.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.104.460.000,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.447.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.79.400.000,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.

**e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan dan transparansi akuntabilitas keuangan pada publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.669.921.703,55 dan terealisasi sebesar Rp.2.483.058.375,00 atau 93,00% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.476.468.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.425.031.000,00 atau 89,20% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.260.290,00 dan terealisasi sebesar Rp.95.163.000,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.765.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.151.636.700,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.49.977.000,00 atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.718.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.197.050.000,00 atau 97,20% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.676.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.800.000,00 atau 31,74% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.434.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.94.400.000,00 atau 97,89% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.769.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.583.000,00 atau 87,96% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.381.669,55 dan terealisasi sebesar Rp.89.033.000,00 atau 76,50% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jasa Administrasi KASDA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.822.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.722.000,00 atau 99,78% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.650.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.
- Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.897.169,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.653.800,00 atau 95,28% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jasa Adminitrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.390.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.882.000,00 atau 76,86% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jasa Adminitrasi Belanja Langsung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.457.875,00 dan terealisasi sebesar Rp.106.351.875,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.116.714.000,00 atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pelayanan BPHTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.69.784.000,00 atau 96,73% dari alokasi anggaran.
- Revaluasi Asset / Barang Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.107.240.000,00 atau 99,07% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Penagihan Pajak dan Retribusi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.766.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.753.037.000,00 atau 98,24% dari alokasi anggaran.

**f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan tersedianya data yang akurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.736.187.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.628.628.000,00 atau 85,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.850.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengelolaan Benda Berharga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.719.337.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.611.778.000,00 atau 85,05% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Keuangan yang direncanakan akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.5.980.207.943,55 dan terealisasi sebesar Rp.5.570.100.568,00 atau 93,14% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.413.641.755.428,28 dan terealisasi sebesar Rp.396.260.151.912,89 atau 95,80% dari alokasi anggaran.

### 5. KEPEGAWAIAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa yang dahulu bernama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi kepegawaian untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.415.914.650,00 dan terealisasi sebesar Rp.415.914.550,00 atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.414.914.650,00 dan terealisasi sebesar Rp.414.914.550,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.204.551.331,00 dan terealisasi sebesar Rp.204.320.050,00 atau 99,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.676.181,00 dan terealisasi sebesar Rp.82.650.000,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.175.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.114.970.050,00 atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.700.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.950.000,00 atau 89,58% dari alokasi anggaran.

### d. **Program Pendidikan Kedinasan**

Program ini bertujuan untuk melakukan pengembangan pendidikan karir PNS melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.718.576.950,00 atau 99,67% dari alokasi anggaran.

### e. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karir PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.769.003.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.755.916.600,00 atau 98,30% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.743.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Seleksi, Pengangkatan dan Penempatan menjadi CPNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.558.129.600,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Seleksi Terbuka pada Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.130.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.184.048.000,00 atau 93,36% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan urusan kepegawaian yang direncanakan akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.2.141.659.081,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.122.678.150,00 atau 99,11% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.493.819.027,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.228.216.968,00 atau 92,4% dari alokasi anggaran.

### 6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### • **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa yang disertai tugas melakukan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang dengan 13 jabatan struktural yang diisi oleh 13 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

#### • **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

##### a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan anggaran sebesar Rp.205.296.425,00 dan terealisasi sebesar Rp.192.428.925,00 atau 93,73% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.387.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.235.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.500.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.267.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.100.000,00 atau 99,81% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.906.925,00 dan terealisasi sebesar Rp.93.206.925,00 atau 88,01% dari alokasi anggaran.

##### b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan anggaran sebesar Rp.70.953.400,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.737.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.116.400,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.100.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan anggaran sebesar Rp.29.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan anggaran sebesar Rp.20.260.175,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.234.000,00 atau 99,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.466.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.454.250,00 atau 99,91% dari alokasi anggaran.
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.793.925,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.779.750,00 atau 99,79% dari alokasi anggaran.
- e. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah**
- Program ini dengan anggaran sebesar Rp.139.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.185.000,00 atau 89,21% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :
- Penelitian Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.050.000,00 atau 93,85% dari alokasi anggaran.
  - Kajian / Penelitian dalam Bidang Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.135.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
  - Kajian / Penelitian dalam Bidang Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.025.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 0% dari alokasi anggaran.



**f. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)**

Program ini melalui kegiatan Sosialisasi Kelitbangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.435.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang direncanakan akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.499.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.471.636.325,00 atau 94,41% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.547.804.124,39 dan terealisasi sebesar Rp.1.410.900.456,00 atau 91,15% dari alokasi anggaran.

**3.1.4 RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan pemerintahan umum telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 14 jabatan struktural yang diisi oleh 14 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.366.932.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.363.512.700,00 atau 99,07% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.565.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.96.301.700,00 atau 99,73% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.270.367.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.267.211.000,00 atau 98,83% dari alokasi anggaran.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.980.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.590.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.590.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **c. Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Politik dan Ormas**

Program ini bertujuan meningkatkan peranan lembaga sosial politik dan ormas dalam menciptakan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi ditengah-tengah masyarakat melalui kegiatan Pendataan dan Pembinaan Ormas dan LSM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.700.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.732.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemantauan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.747.500,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.985.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **e. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program ini melalui kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.485.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

### **f. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Program ini bertujuan peningkatan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak criminal melalui kegiatan Peningkatan Efektifitas Penanganan Konflik Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.819.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.319.000,00 atau 89,62% dari alokasi anggaran.

### **g. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**

Program ini bertujuan meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba (NGO/AKTUAL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.420.000,00 atau 50,00% dari alokasi anggaran.

### **h. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan ormas, dengan alokasi anggaran



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.55.762.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.562.000,00 atau 97,85% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyuluhan Kepada Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.400.000,00 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Desk Pilkada, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.362.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.162.000,00 atau 97,71% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan pemerintahan umum yang direncanakan akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa pada T.A. 2020 sebesar Rp.540.250.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.531.711.200,00 atau 98,42% dari alokasi anggaran.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.733.011.479,57 dan terealisasi sebesar Rp.1.416.642.765,00 atau 81,74% dari alokasi anggaran.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis merupakan suatu aturan – aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2016 - 2021 yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut:

#### **MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis pada Hak-Hak Dasar, Kesetaraan Gender, Nilai Budaya dan Agama.**

- 1) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas“, diterapkan:

Strategi 1 : Peningkatan layanan dan mutu pendidikan untuk semua.

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan proporsional.

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan.

- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas“, diterapkan:

Strategi 2 : Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik pada upaya yang bersifat promotif dan preventif maupun pada upaya yang bersifat kuratif dan rehabilitatif secara proporsional.

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui penambahan



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- jumlah tenaga, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman“, diterapkan:  
Strategi 3 : Peningkatan ketersediaan, distribusi, keamanan pangan dan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan melalui desa mandiri.  
Arah Kebijakan 4 : Penguatan ketahanan pangan.
- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan perumahan yang layak“, diterapkan:  
Strategi 4 : Pengembangan sistem drainase dan utilitas berbasis jaringan terpadu.  
Arah Kebijakan 5 : Penataan perumahan dan pemukiman layak huni.
- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha“, diterapkan:  
Strategi 5 : Peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusdiklat ketenagakerjaan.  
Arah Kebijakan 6 : Peningkatan peluang dan kesempatan kerja.  
Arah Kebijakan 7 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 6) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya rasa aman dan tenteram“, diterapkan:  
Strategi 6 : Pengembangan sistem keamanan lingkungan.  
Arah Kebijakan 8 : Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.  
Arah Kebijakan 9 : Penanganan bencana dan kebakaran.
- 7) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak“, diterapkan:  
Strategi 7 : Peningkatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.  
Arah Kebijakan 10 : Pengarusutamaan gender.  
Arah Kebijakan 11 : Pengarusutamaan hak anak.
- 8) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana“, diterapkan:  
Strategi 8 : Penurunan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka kelahiran total (TFR) menuju penduduk tumbuh seimbang melalui penyadaran Program KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi.  
Arah Kebijakan 12 : Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan pemakaian



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- kontrasensi (CPR) baik laki-laki maupun perempuan.
- Arah Kebijakan 13 : Penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) dan angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).
- 9) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”, diterapkan:  
Strategi 9 : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan memastikan terpenuhinya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam proses pembangunan bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan usia, jenis kelamin, kebutuhan yang berbeda, disabilitas dan sosial.
- Arah Kebijakan 14 : Peningkatan kemandirian para fakir miskin komunitas adat terpencil, dan PMKS.
- 10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga”, diterapkan:  
Strategi 10 : Sinergitas stakeholder dalam pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga.
- Arah Kebijakan 15 : Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan fasilitasi cabang olahraga.
- 11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya”, diterapkan:  
Strategi 11 : Revitalisasi keragaman dan kekayaan budaya.
- Arah Kebijakan 16 : Pemeliharaan nilai-nilai budaya masyarakat.
- 12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius”, diterapkan :  
Strategi 12 : Peningkatan kapasitas penyuluh agama dan lembaga-lembaga keagamaan.
- Arah Kebijakan 17 : Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
- MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis pada Potensi Unggulan dan Ekonomi Kerakyatan**
- 13) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan”, diterapkan:  
Strategi 13 : Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan.
- Arah Kebijakan 18 : Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan.
- 14) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, diterapkan:  
Strategi 14 : Peningkatan status baku mutu air dan penegakan hukum lingkungan.
- Arah Kebijakan 19 : Peningkatan pengawasan dan pemantauan status baku mutu air.
- Arah Kebijakan 20 : Pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.
- 15) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengembangan koperasi dan UMKM, diterapkan:



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Strategi 15 : Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah yang pro gender, disabilitas, kelompok marginal dan minoritas lainnya.

Arah Kebijakan 21 : Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM.

16) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif”, diterapkan:

Strategi 16 : Promosi dan pemasaran potensi wisata unggulan.

Arah Kebijakan 22 : Pengembangan potensi wisata unggulan.

Arah Kebijakan 23 : Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif.

17) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya iklim investasi dan perdagangan”, diterapkan:

Strategi 17 : Menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa melalui fasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha.

Arah Kebijakan 24 : Peningkatan perluasan informasi barang dan jasa serta peluang investasi daerah yang dapat dikembangkan.

Arah Kebijakan 25 : Peningkatan kualitas perdagangan berbasis pasar rakyat.

### **MISI 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi pada Interkoneksi Antar Wilayah dan Sektor**

18) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan dan pengairan“, diterapkan:

Strategi 18 : Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan, jembatan dan irigasi.

Arah Kebijakan 26 : Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dan jaringan irigasi.

19) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya”, diterapkan:

Strategi 19 : Pengembangan taman tematik dan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Arah Kebijakan 27 : Pemanfaatan ruang terbuka hijau.

20) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman“, diterapkan:

Strategi 20 : Peningkatan sarana dan prasarana air minum, penanaman budaya bersih serta penanganan sampah berbasis masyarakat (3R).

Arah Kebijakan 28 : Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum.

Arah Kebijakan 29 : Gerakan Gowa Bersih.

Arah Kebijakan 30 : Peningkatan aksesibilitas sanitasi.

### **MISI 4: Meningkatkan Pengembangan Wilayah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan**

21) Untuk mencapai sasaran “Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan“, diterapkan:

Strategi 21 : Peningkatan kapasitas dan peran lembaga masyarakat desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat.





## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Arah Kebijakan 31 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Arah Kebijakan 32 : Peningkatankapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat.

Arah Kebijakan 33 : Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Arah Kebijakan 34 : Optimalisasi penggunaan dan pengawasan keuangan desa.

Arah Kebijakan 35 : Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi.

22) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah berbasis kawasan“, diterapkan:

Strategi 22 : Pengembangan kawasan strategis secara terpadu.

Arah Kebijakan 36 : Optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis.

Arah Kebijakan 37 : Pengembangan kawasan pedesaan.

### **MISI 5: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Demokratis**

23) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas pemerintahan“, diterapkan:

Strategi 23 : Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah Kebijakan 38 : Pembinaan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

Arah Kebijakan 39 : Pengembangan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Arah Kebijakan 40 : Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan 41 : Pengembangan ketatalaksanaan, kearsipan, persandian, sistem dan budaya kerja perangkat daerah berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan 42 : Pengembangan SDM aparatur, pembinaan karier berbasis kompetensi.

Arah Kebijakan 43 : Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan berbasis sistem inovasi daerah.

24) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah“, diterapkan:

Strategi 24 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Arah Kebijakan 44: Peningkatan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem



## Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.

Arah Kebijakan 45 : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas pencapaian target dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

25) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan publik”, diterapkan:

Strategi 25 : Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan inovasi satu layanan satu inovasi dan pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Arah Kebijakan 46 : Pengembangan inovasi layanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

26) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi”, diterapkan:

Strategi 26 : Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Arah Kebijakan 47 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset.

27) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik”, diterapkan:

Strategi 27 : Penguatan kelembagaan partai politik.

Arah Kebijakan 48 : Peningkatan pembinaan partai politik dan organisasi politik.

### 3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD, berupa catatan strategis sebagai masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menentukan kebijakan kedepan sebagai berikut :

#### 1. URUSAN INSPEKTORAT

Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan khususnya pengawasan penyelenggara pemerintahan desa yang perlu ditingkatkan, mengingat adanya beberapa kejadian pada beberapa waktu lalu yang melibatkan para Kepala Desa.;

#### 2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Apresiasi diberikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena berhasil menjadi pengelola dana desa terbaik (ADDK Desa), namun disisi lain masih terdapat beberapa Kepala Desa



## **Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah**

yang bermasalah atau terjerat masalah hukum terkait pengelolaan ADDK Desa tersebut. Oleh karenanya kami sangat berharap bahwa kedepan pembinaan, pendampingan serta pengawasan sangat perlu ditingkatkan sehingga dimasa yang akan datang hal-hal tersebut tidak terjadi lagi.

### **3. URUSAN CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN**

Diharapkan agar Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk senantiasa terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini mengingat bahwa selain sebagai dinas yang langsung melakukan layanan pada masyarakat, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan juga masih menerima beberapa aduan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan.

### **4. URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Sebagai unit kerja yang melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan peraturan daerah di Kabupaten Gowa, maka peran Satpol untuk meningkatkan bagaimana penyelenggaraan peraturan perda dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu contoh Perda Pengawasan Ternak di Kabupaten Gowa yang belum terlaksanakan secara baik. Dilapangan kami masih sering melihat ternak-ternak yang masih berkeliaran diarea-area yang bukan jalur ternak dan ini sangat mengganggu daerah pemukiman maupun gangguan terhadap jalur lalu lintas. Kiranya kedepan mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk bagaimana pengaturan dari ternak-ternak ini, dan jika memang membutuhkan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan peraturan daerah maka pemerintah daerah wajib memfasilitasinya.

### **5. BADAN PERENCANAAN EMBANGUNAN DAERAH**

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi terhadap kinerja Bappeda, namun DPRD bahwa perlu mendapatkan perhatian mengenai sistem Musrebang yang terkesan kegiatan Musrebang hanya kegiatan rutin tetapi dalam pelaksanaan perencanaannya ada usulan-usulan yang sudah lama tetapi tetap tidak masuk dalam prioritas perencanaan. Demikian pula dengan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir) yang cenderung tidak masuk dalam perencanaan di Bappeda. Oleh karenanya kedepan Bappeda dapat lebih memperhatikan apa yang diusulkan pada tingkat Desa/Kel/Kecamatan untuk selanjutnya dimasukkan kedalam perencanaan di Bappeda.

### **6. URUSAN INFRASTRUKTUR / PEKERJAAN UMUM**

DPRD memberikan catatan terkait urusan Pekerjaan Umum, yaitu antara lain banyaknya silva pada Dinas Pekerjaan Umum, adanya proyek yang menyebrang tahun, adanya proyek yang gagal lelang/tender, proyek yang belum lama dikerjakan tapi sudah dilakukan rehab pekerjaan, serta jaminan terkait pekerjaan yang ada di Kabupaten Gowa, sebagai contoh pekerjaan pembangunan Jembatan Kasangi. DPRD meminta kepada Pemda agar memperhatikan kegiaiatan-kegiatan tersebut. Kira pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan kualitas dari pembangunan infrastruktur untuk lebih ditingkatkan, termasuk melakukan perencanaannya secara baik.



**7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya keberhasilan Pemda dalam meraih 8 (delapan) kali WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi bahwa perlu ada upaya-upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang baru yang tidak memberatkan masyarakat, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara ketat khususnya penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

**8. URUSAN PENDIDIKAN**

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi terhadap Pemda atas keberhasilan mendapatkan penghargaan dan prestasi, namun DPRD Kabupaten Gowa memberikan rekomendasi seperti Gedung-gedung sekolah yang rusak agar mendapatkan perhatian untuk perbaikan/rehabilitasi, perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas layanan pendidikan dan meminta adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, serta mengharapkan agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, mengharapkan penataan pendidikan disemua jenjang yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Gowa

**9. URUSAN KESEHATAN**

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi atas kinerja layanan kesehatan, namun DPRD perlu memberikan rekomendasi terkait peningkatan SDM baik kuantitas dan kualitasnya guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, meminta adanya peningkatan sarana dan prasarana di setiap puskesmas karena masih banyak alat-alat penunjang seperti tempat tidur, ruangan perawatan yang belum representative dan perlunya dimaksimalkan fungsi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf, serta DPRD meminta agar Pemda memperhatikan kesejahteraan tenaga medis honorer.

**10. URUSAN SOSIAL**

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemda terhadap kinerja terkait kesejahteraan sosial, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemda bahwa perlu peningkatan pengalokasian anggaran yang belum mendapatkan fasilitas KIS.

**11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja dalam penataan sampah dan kebersihan, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi bahwa perlu peningkatan sosialisasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga sehingga volume sampah yang diangkut ke tempat-tempat pembuangan sampah lebih berkurang, DPRD meminta kepada Pemda agar pengelolaan sampah di Kota Sungguminasa dan sekitarnya lebih ditingkatkan termasuk penambahan armada angkutan sampah.



**BAB IV**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN  
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

**4.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA**

Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam bentuk penyerahan tugas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara umum untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kabupaten Gowa.

Sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran yang bervariasi sesuai formula tersebut. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengalokasian dan penatausahaan program ini terletak pada 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa.

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten Gowa meliputi peningkatan usaha ekonomis produktif, pemeliharaan dan pemupukan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan stimulan gotong royong. Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan antara lain dengan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana serta dukungan ketersediaan operasional.

Adapun Tugas-tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2020, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.



## Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

**Tabel 4.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020**

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Kementerian Pertanian	TP (DIPA. 018.03.4.199125) Tanggal 29 Januari 2019	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Jaringan Irigasi Tersier	Rehabilitasi Irigasi	7 Kecamatan	Rp 600.000.000,-	Rp 600.000.000,-
				Irigasi Perpompaan	Rumah Pompa	7 Kecamatan	Rp 420.000.000,-	Rp 420.000.000,-
				Pembangunan Embung Pertanian	Embung	7 Kecamatan	Rp 240.000.000,-	Rp 240.000.000,-
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian	Alat dan Mesin Pra Panen	Alsintan	Kab. Gowa	Rp 545.850.000,-	Dialihkan ke anggaran Refocusing COVID-19
				Fasilitasi Teknis Dukungan Pengelolaan Penyediaan/Pengawasan Alat Pertanian	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp 50.000.000,-	Dialihkan ke anggaran Refocusing COVID-19
			Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Pengelolaan Keuangan	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp 197.000.000,-	Rp 197.000.000,-
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp 227.150.000,-	Rp 227.150.000,-
				Bimtek, Monitoring dan Evaluasi	Rapat dan Honorarium	Kab. Gowa	Rp 84.500.000,-	Dialihkan ke anggaran Refocusing COVID-19
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi	Rapat, Honor dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp 171.190.000,-	Dialihkan ke anggaran Refocusing COVID-19



### Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun 2020 (DIPA. 018.08.199133/2020 Tgl 07 Januari 2020	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kawasan Kedelai/Porang	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 330.000.000,-	Rp 330.000.000,-
				Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kawasan Ubi Kayu	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 115.000.000,-	Rp 115.000.000,-
					Kawasan Kacang Tanah	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 19.500.000,-	Rp 19.500.000,-
					Kawasan Kacang Ijo	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 130.500.000,-	Rp 130.500.000,-
					Koordinasi, Bimtek dan Monitoring	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 36.500.000,-	Rp 36.500.000,-
					Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi	18 Kecamatan	Rp 582.037.000,-
				Koordinasi, Bimtek dan Monitoring & Evaluasi		18 Kecamatan	Rp 38.500.000,-	Rp 38.500.000,-
				Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Koordinasi, Bimtek dan Monitoring & Evaluasi	Kec. Bontonompo	Rp 18.449.000,-	Rp 18.449.000,-
				Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kab. Gowa	Rp 104.200.000,-	Rp 104.200.000,-
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 734.424.000,-	Rp 734.424.000,-
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Beberapa Kecamatan di Kab. Gowa	Rp 120.000.000,-	Rp 120.000.000,-					



### Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

3	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan DIPA - 018.04.4.199043/2020 Tgl 23 Januari 2020	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kawasan Bawang Merah	Kec. Tinggimnocong, Tompobulu, Bontolempangan dan Biringbulu	Rp 580.000.000,-	Rp 570.121.540,-
					Kawasan Sayuran Lainnya/Umbi/Kentang	Kec. Tinggimoncong dan Tombolo Pao	Rp 600.000.000,-	Rp 549.070.000,-
				Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Manajemen pada Satker	Kec. Tinggimoncong, Tompobulu, Tombolo Pao, Bontolempangan, Biringbulu dan Parigi	Rp 105.000.000,-	Rp 105.000.000,-
4	Kementerian Ketenagakerjaan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : 3/31578/PK.03X/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 tentang Penerimaan Bantuan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja (Lampiran I) dan Bantuan Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Lampiran II) sebanyak 368 Paket pada Lembaga	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Padat Karya Infrastruktur	Pengerasan Jalan Tani	Desa Bontomanani Kec. Bajeng Barat	Rp 90.000.000,-	Rp 90.000.000,-
					Rabat Beton	Desa Manjapai Kec. Bontonompo Selatan	Rp 90.000.000,-	Rp 90.000.000,-
						Desa Rappoala Kec. Bajeng Barat	Rp 90.000.000,-	Rp 90.000.000,-
					Pengerasan Jalan	Desa Tanakaraeng Kec. Manuju	Rp 90.000.000,-	Rp 90.000.000,-
				Penciptaan Wirausaha Baru (TKM)	Pembekalan Usaha Menjahit	Desa Belapunraga Kec. Parangloe	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
					Pembekalan Alat Pertanian	Desa Belapunraga Kec. Parangloe	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-





**Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan**

		Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Tahun 2020			Pembekalan Usaha Laundry	Kel. Katangka Kec. Somba Opu	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
					Pembekalan Usaha Makanan Ringan	Desa Maradekayya Kec. Bajeng Barat	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
					Pembekalan Usaha Depot Air Minum	Desa Mangalli Kec. Pallangga	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
					Pembekalan Alat Pertanian	Kel. Lanna Kec. Parangloe	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
					Pembekalan Usaha Menjahit	Kel. Lanna Kec. Parangloe	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
					Pembekalan Usaha Menjahit	Kel. Lanna Kec. Parangloe	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-
5	Kementerian Perdagangan	SP DIPA-090.02.4.190244/2020	Peningkatan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Rakyat Bontorea Kec. Pallangga	Rp 99.500.000,-	Rp 99.500.000,-



#### **4.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA**

Tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang melaksanakan.

#### **4.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

- a. Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura  
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi  
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.



## BAB V P E N U T U P

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam tahun 2020.

Sebagai output penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa yakni hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur pemerintah daerah. Keberhasilan yang telah dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi dari semua komponen Pemerintahan Daerah, yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga kondisi tersebut akan membentuk *check and balances* yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Gowa dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada periode kepemimpinan kami, patut disyukuri mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi komitmen perencanaan pemerintah sekaligus tolok ukur untuk mendorong kinerja aparat pemerintah daerah untuk semakin baik dan semakin berkualitas.

Dibalik semua capaian kinerja yang telah dihasilkan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi sumber daya maupun faktor-faktor lainnya di luar jangkauan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gowa. Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan untuk pencapaian seluruh indikator yang menjadi target pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2020, yang pada akhirnya semua capaian indikator tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gowa.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun tersebut masih terdapat banyak keterbatasan, oleh karenanya semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi catatan yang bermanfaat dan menjadi umpan balik untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun-tahun mendatang.



Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan Nya kepada kita sekalian.

**BUPATI GOWA,**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH.**